



UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SEBAGAI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP): PERSEPSI MAHASISWA PADA PTN DAN PTKIN BLU

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[25 Mei 2025]

Dinyatakan Diterima
[19 September 2025]

KATA KUNCI:

Uang Kuliah Tunggal (UKT), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Badan Layanan Umum (BLU) Pendidikan

KLASIFIKASI JEL:

H270 Taxation, Subsidies, and Revenues: Other Sources of Revenue

ABSTRAK

This study evaluates the implementation of the Single Tuition Fee (Uang Kuliah Tunggal/UKT) policy in ten state universities with Public Service Agency (BLU) status, emphasizing the role of UKT as a non-tax state revenue (PNBP) instrument within the framework of public financial management. The analysis was conducted based on students' perceptions of UKT determination, service quality, and financing accessibility. The research employed a quantitative approach through the distribution of questionnaires, complemented by Importance-Performance Analysis (IPA) and the Customer Satisfaction Index (CSI). The findings show that more than 55% of students considered their UKT category misaligned with their family's economic conditions. Although the overall student satisfaction index is relatively positive, the IPA indicates significant performance gaps, particularly in the provision of supporting facilities and campus infrastructure. In addition, UKT financing accessibility remains a challenge, with 28.65% of students reporting the need for additional financial support beyond parental contributions. Perceptual differences are also evident across university characteristics, particularly in Islamic state universities (PTKIN) and institutions located outside Java–Sumatra. These findings highlight the importance of improving transparency in UKT determination, evaluating the utilization of BLU PNBP for enhancing service quality, and strengthening student financing schemes to support a more equitable and sustainable public financial management system.

Penelitian ini mengevaluasi implementasi kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada sepuluh perguruan tinggi Badan Layanan Umum (BLU) dengan menekankan peran UKT sebagai instrumen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam kerangka pengelolaan keuangan negara. Analisis dilakukan melalui persepsi mahasiswa terhadap penetapan UKT, kualitas layanan, serta aksesibilitas pembiayaan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner yang dilengkapi dengan *Importance-Performance Analysis* (IPA) dan *Customer Satisfaction Index* (CSI). Hasil kajian menunjukkan bahwa lebih dari 55% mahasiswa merasa kelompok UKT yang dibayarkan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga mereka. Walaupun indeks kepuasan mahasiswa relatif positif, analisis IPA mengindikasikan adanya kesenjangan kinerja layanan, terutama dalam penyediaan fasilitas pendukung dan fisik kampus. Selain itu, aksesibilitas pembiayaan UKT masih menjadi tantangan, dengan 28,65% mahasiswa menyatakan membutuhkan bantuan keuangan tambahan di luar dukungan orang tua. Perbedaan persepsi juga terlihat antar karakteristik perguruan tinggi, khususnya pada PTKIN dan perguruan tinggi di wilayah Non Jawa–Sumatera. Temuan ini menegaskan pentingnya perbaikan transparansi penetapan UKT, evaluasi pemanfaatan PNBP BLU untuk peningkatan kualitas layanan, serta penguatan skema pembiayaan mahasiswa untuk mendukung tata kelola keuangan negara yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi adalah salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara, yang memberikan landasan bagi perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas (Tilak, 2018). Perguruan tinggi negeri memiliki peran strategis dalam menyediakan aksesibilitas pendidikan tinggi bagi masyarakat (Johnstone, 2004). Namun, biaya pendidikan tinggi sering menjadi hambatan bagi banyak individu, terutama mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah (Salmi & Bassett, 2014). Mahasiswa sering mengalami kesulitan keuangan yang signifikan dalam menanggung biaya pendidikan mereka (Nuckols et al., 2020).

Salah satu inisiatif untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi adalah penerapan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada perguruan tinggi. UKT adalah sistem pembayaran biaya kuliah berbasis kemampuan ekonomi mahasiswa, yang bertujuan untuk memberikan kesetaraan akses pendidikan tinggi bagi semua golongan masyarakat. Kebijakan UKT, yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan keadilan dalam pendidikan tinggi (Retnoningsih & Marom, 2017), tidak terlepas dari dinamika pengelolaan keuangan negara. Khususnya bagi perguruan tinggi yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU), UKT memiliki dimensi tambahan sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Status BLU memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang unik, memungkinkan perguruan tinggi untuk menggunakan pendapatan, termasuk dari UKT, secara langsung untuk membiayai operasional dan peningkatan layanan tanpa harus menyetorkannya ke Kas Negara terlebih dahulu. Fleksibilitas ini, meskipun memberikan otonomi yang lebih besar, juga menuntut akuntabilitas yang tinggi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

Namun, kebijakan UKT tidaklah tanpa kontroversi. Sejumlah pihak mengkritik sistem ini, mengklaim bahwa UKT dapat menjadi hambatan bagi akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari latar belakang ekonomi lemah (Anggraini & Yuliana, 2024). Selain itu, dampak UKT juga dapat dirasakan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Meskipun UKT dimaksudkan untuk membantu membiayai operasional perguruan tinggi, implementasinya seringkali menghasilkan berbagai konsekuensi, seperti peningkatan beban keuangan, penurunan daya beli mahasiswa, dan bahkan penurunan kehadiran dan minat belajar mahasiswa (Fauziah & Purnamasari, 2025; Iskandar et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang komprehensif untuk menganalisis implementasi UKT terhadap pendidikan tinggi di Indonesia dari berbagai perspektif, termasuk dalam dimensi fiskal dalam kerangka pengelolaan PNBPN BLU. Penelitian ini akan membantu dalam memahami efektivitas dan implikasi UKT sebagai salah satu bentuk PNBPN serta mengevaluasi apakah sistem ini memenuhi tujuan awalnya atau justru menciptakan masalah baru dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia.

Studi terkait implementasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Indonesia masih terbatas, terutama pada perguruan tinggi negeri yang berstatus BLU. Yanni et al. (2018) mengevaluasi persepsi mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Padang terhadap UKT, menemukan bahwa kebijakan tersebut dinilai cukup efektif namun perlu disosialisasikan lebih baik. Sementara itu, studi oleh Yanti (2023) di IAIN Parepare menunjukkan bahwa penetapan nilai UKT didasarkan pada Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi (SSBOPT), dengan faktor seperti akreditasi prodi dan kondisi ekonomi mahasiswa mempengaruhi penetapannya. Namun, penelitian Sumarno et al. (2017) di Universitas Riau menemukan bahwa biaya UKT tidak berbeda signifikan dengan biaya non-UKT, meskipun mahasiswa dengan UKT memberi penilaian kualitas layanan pendidikan yang lebih rendah. Terkait BLU pendidikan, Kurniawan & Sugiri (2021) menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Yogyakarta berada dalam kategori baik secara umum, namun masih ada aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Meskipun belum ada studi yang membandingkan penerapan UKT antar perguruan tinggi di Indonesia, studi di Lebanon menunjukkan bahwa perguruan tinggi dengan model akademik Amerika dan Prancis cenderung lebih memuaskan mahasiswa dalam pengambilan keputusan institusional (Issa Nauffal, 2009).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan UKT sebagai PNBPN BLU dengan menjawab empat pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap kesesuaian penetapan kelompok UKT yang mereka bayarkan?
2. Bagaimana persepsi mahasiswa atas kepentingan dan performa layanan perguruan tinggi dengan mempertimbangkan besaran UKT yang mereka bayarkan?
3. Bagaimana persepsi mahasiswa atas kepuasan layanan perguruan tinggi dengan mempertimbangkan besaran UKT yang mereka bayarkan?
4. Bagaimana persepsi mahasiswa atas aksesibilitas pembiayaan pembayaran UKT perguruan tinggi?

Secara komprehensif tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa terhadap penetapan UKT, persepsi atas layanan perguruan tinggi yang dikaitkan dengan penetapan UKT, serta persepsi atas pembiayaan pembayaran UKT perguruan tinggi. Penelitian ini juga akan melakukan analisis komparatif atas persepsi mahasiswa berdasarkan karakteristik perguruan tinggi, yaitu jenis perguruan tinggi dan wilayah.

Penelitian ini penting dilakukan karena sebagian besar kajian sebelumnya lebih banyak menyoroti UKT dari perspektif aksesibilitas pendidikan, sementara dimensi fiskal dalam kerangka pengelolaan PNBPN BLU relatif belum banyak dikaji. Dengan mengevaluasi persepsi mahasiswa, penelitian ini berusaha menilai sejauh mana kebijakan UKT tidak hanya mampu mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi, tetapi juga mendukung tata kelola keuangan negara yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1. Badan Layanan Umum (BLU) dan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU, disebutkan bahwa Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Secara organisasi, kedudukan kelembagaan BLU berada di bawah Kementerian/Lembaga yang sesuai dengan bidang tugas BLU terkait.

Adapun dalam pengelolaan keuangan, BLU tidak mengikuti pola keuangan satuan kerja pemerintah secara umum, melainkan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Berdasarkan PP tersebut, Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) didefinisikan sebagai pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan BLU, diharapkan BLU dapat lebih leluasa dalam mengelola keuangan dengan mengikuti praktik bisnis yang sehat.

Dalam konteks BLU, pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan, hasil pengelolaan kekayaan, atau pemanfaatan aset merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam PMK Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 155/PMK/02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP, PNBP didefinisikan sebagai pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. PNBP memiliki peran strategis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu sumber pendapatan utama di samping pajak dan hibah. Kontribusi PNBP sangat vital dalam menopang kebutuhan pendanaan pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Karakteristik unik dari PNBP yang dikelola oleh BLU adalah fleksibilitas penggunaannya. Berbeda dengan satuan kerja pemerintah non-BLU yang wajib menyetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Negara, PNBP pada BLU dapat digunakan secara langsung untuk membiayai belanja BLU yang bersangkutan, tanpa harus disetor terlebih dahulu ke Kas Negara. Fleksibilitas pengelolaan pendapatan ini termasuk dalam pengaturan terkait pola pengelolaan keuangan BLU melalui PP Nomor 74 Tahun 2012.

Dengan demikian, PNBP pada BLU tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi negara, tetapi juga sebagai instrumen pembiayaan operasional yang fleksibel bagi instansi BLU itu sendiri. Hal ini memungkinkan BLU untuk merespons kebutuhan operasional dan pengembangan layanan dengan lebih cepat dan efisien, sejalan dengan prinsip praktik bisnis yang sehat yang diamanatkan dalam regulasi BLU (Carolina, 2021). Pengelolaan PNBP ini juga harus tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi, mengingat dana tersebut pada dasarnya adalah keuangan negara yang dipercayakan kepada BLU untuk dikelola secara efektif demi kepentingan pelayanan publik.

2.2. BLU Bidang Pendidikan

BLU Bidang Pendidikan dibentuk sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah terkait peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Saat ini terdapat 3 (tiga) kategori BLU Bidang Pendidikan yaitu:

1. Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut Perguruan Tinggi Negeri (PTN), terdiri dari Universitas dan Politeknik penyelenggara pendidikan tinggi yang diperuntukkan bagi masyarakat luas,
2. Pendidikan Tinggi Agama di bawah Kementerian Agama, yang selanjutnya disebut Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), terdiri dari Universitas dan Institut Agama penyelenggara pendidikan tinggi yang diperuntukkan bagi masyarakat luas, dan
3. Pendidikan Kedinasan di bawah Kementerian/Lembaga yang terdiri dari Badan Pendidikan dan Pelatihan, Politeknik, Akademi, dan Sekolah Tinggi.

Sebagaimana BLU pada umumnya, dalam pengelolaan keuangan BLU Bidang Pendidikan khususnya Pendidikan Tinggi juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012. Namun demikian secara fungsi, BLU Bidang Pendidikan juga tunduk pada Undang-Undang Pendidikan maupun peraturan turunannya di antaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, maupun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Keseluruhan kebijakan tersebut tentunya ditujukan untuk menjadi pedoman bagi para pelaku pendidikan di antaranya BLU Bidang Pendidikan agar tetap sejalan dengan program Pemerintah di Bidang Pendidikan. Di antara kebijakan yang ditetapkan Pemerintah adalah bahwa untuk mengatur biaya yang ditanggung oleh mahasiswa agar sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya, maka diaturlah biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri. Dengan pengaturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas (Retnoningsih & Marom, 2017).

2.3. Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai PNBP

Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk perguruan tinggi negeri. UKT pertama kali dikeluarkan pada tahun 2013 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Permendikbud tersebut, Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah sebagian dari biaya kuliah tunggal yang harus ditanggung oleh setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Sementara itu, Biaya Kuliah Tunggal merujuk pada total biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri. Biaya kuliah tunggal digunakan sebagai dasar untuk menetapkan biaya yang harus dibebankan kepada mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah.

Kebijakan UKT ini merupakan salah satu upaya pembenahan sistem pelayanan di bidang Pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, yaitu melalui pembenahan mekanisme Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP). Mekanisme SPP yang digunakan sebelumnya dipandang sebagai beban dalam sistem biaya pendidikan tinggi bagi mahasiswa. UKT ini menggunakan sistem penghitungan akumulatif satuan biaya operasional yang memudahkan masyarakat untuk memprediksi jumlah biaya yang dikeluarkan mulai saat mendaftar kuliah hingga memperoleh ijazah tanpa adanya pungutan lain, seperti uang gedung, uang SKS, uang praktikum, uang buku, uang wisuda, dan biaya lainnya.

Dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, UKT yang dipungut oleh PTN dengan status BLU dikategorikan sebagai PNBP. Hal ini menjadikan UKT bukan hanya instrumen kebijakan pendidikan, tetapi juga bagian dari kebijakan fiskal yang berkontribusi pada penerimaan negara.

Sebagai bagian dari PNBP, UKT memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai sumber pendanaan operasional perguruan tinggi yang mendukung fleksibilitas BLU dalam meningkatkan kualitas layanan Pendidikan. Kedua, sebagai instrumen fiskal yang berfungsi menjaga keberlanjutan pendanaan pendidikan tinggi tanpa sepenuhnya bergantung pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan fleksibilitas PPK-BLU, perguruan tinggi memiliki keleluasaan untuk langsung menggunakan penerimaan UKT guna mendukung belanja operasional, pengembangan fasilitas, serta peningkatan mutu layanan akademik.

Dalam perspektif kebijakan publik, UKT juga mencerminkan penerapan prinsip diskriminasi harga berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa. Mahasiswa dari keluarga berpenghasilan lebih tinggi membayar tarif UKT yang lebih besar, sehingga secara implisit terdapat mekanisme subsidi silang untuk mendukung akses mahasiswa kurang mampu. Dengan demikian, UKT sebagai PNBP memiliki peran strategis tidak hanya dalam mendukung kemandirian fiskal perguruan tinggi BLU, tetapi juga dalam memastikan keberlanjutan akses pendidikan tinggi yang lebih adil, merata, dan sejalan dengan tujuan pembangunan sumber daya manusia Indonesia (Amany et al., 2020).

Dalam aturan dan mekanisme penentuan UKT disebutkan bahwa pemerintah menetapkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) secara periodik dengan mempertimbangkan capaian standar nasional pendidikan tinggi, jenis program studi dan indeks kemahalan wilayah. SSBOPT tersebut ditetapkan sebagai dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam APBN untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Pada lingkup PTN, SSBOPT diatur melalui Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang SSBOPT pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SSBOPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan: 1) capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 2) jenis Program Studi; dan 3) indeks kemahalan wilayah. Dalam Pasal 4 Permendikbud tersebut diatur bahwa SSBOPT dihitung berdasarkan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung meliputi biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Program Studi, sedangkan biaya tidak langsung merupakan biaya operasional pengelolaan institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan Program Studi.

Kemudian, Permendikbud tersebut juga mengatur ketentuan terkait penetapan besaran UKT sebagai berikut:

1. Besaran UKT ditetapkan oleh pemimpin PTN bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana dari setiap jalur penerimaan Mahasiswa.
2. Besaran UKT bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana tersebut terbagi dalam beberapa kelompok yang terdiri atas paling sedikit 2 (dua) kelompok, misalnya:
 - a. kelompok I dengan besaran UKT paling tinggi Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah); dan

- b. kelompok II dengan besaran UKT paling rendah Rp501.000 (lima ratus satu ribu rupiah) dan paling tinggi Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
3. Persentase Mahasiswa yang dikenakan besaran UKT kelompok I dan kelompok II dan Mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah berjumlah paling sedikit 20% dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima di setiap PTN dan semua Program Studi.
4. Penetapan besaran UKT untuk setiap kelompok berlaku sama bagi Mahasiswa pada setiap jalur penerimaan.
5. Penetapan kelompok besaran UKT dan Mahasiswa dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi:
 - a. Mahasiswa;
 - b. orang tua Mahasiswa; atau
 - c. pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
6. Penetapan kemampuan ekonomi dilakukan berdasarkan pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga dari Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
7. Besaran UKT setiap kelompok ditetapkan dengan satu nilai nominal.
8. Besaran UKT paling tinggi sama dengan besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi.
9. Dalam hal penghitungan besaran UKT terdapat:
 - a. ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa; atau
 - b. perubahan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa,pemimpin PTN dapat menurunkan atau menaikkan besaran UKT melalui penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap Mahasiswa.
10. PTN dapat memungut iuran pengembangan institusi sebagai pungutan dan/atau pungutan lain selain UKT dari Mahasiswa program diploma dan program sarjana bagi:
 - a. Mahasiswa asing;
 - b. Mahasiswa kelas internasional;
 - c. Mahasiswa yang melalui jalur kerja sama; dan/atau
 - d. Mahasiswa yang masuk melalui seleksi mandiri.

Berbeda dengan PTN, PTKIN merupakan perguruan tinggi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Agama. Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, khususnya terkait pengaturan SSBOPT, PTKIN mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 7 tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Adapun dalam penetapan uang kuliah tunggal mengacu pada penetapan SSBOPT standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang didasarkan pada:

1. Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (BOPT) yang merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam 1 (satu) tahun;
2. Indeks status perguruan tinggi;
3. Indeks mutu PTKIN dan indeks mutu program studi;
4. Indeks pola pengelolaan keuangan pada PTKIN; dan
5. Indeks kemahalan wilayah.

Kemudian, di dalam Pasal 8 dan 9 PMA tersebut disebutkan bahwa penetapan besaran uang kuliah tunggal ditetapkan sebagai berikut:

1. Penetapan besaran UKT memperhatikan SSBOPT dan BOPT;
2. UKT ditetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayainya;
3. Penetapan uang kuliah tunggal terbagi dalam 7 (tujuh) kelompok pada universitas, 5 (lima) kelompok pada institut, dan 3 (tiga) kelompok pada sekolah tinggi; dan
4. Besaran uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi keagamaan negeri terdiri atas:
 - a. Kelompok paling rendah sebesar Rp0-Rp400.000. Penetapan kelompok ini paling sedikit 5% dari jumlah mahasiswa yang diterima di PTKIN.
 - b. Kelompok paling tinggi sama dengan SSBOPT.
 - c. Kelompok UKT bagi mahasiswa penerima Bidikmisi dipisahkan kelompok tersendiri.

Selanjutnya, setiap tahun akademik Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama yang mengatur besaran UKT untuk setiap kelompok. Untuk Tahun Akademik 2023/2024, telah ditetapkan besaran UKT pada PTKIN melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 82 Tahun 2023 tentang UKT pada PTKIN Tahun Akademik 2023-2024. Pada KMA tersebut juga diatur bahwa PTKIN dilarang memungut uang pangkal dan pungutan lain selain UKT PTKIN dari mahasiswa baru program diploma dan program sarjana.

2.4. Kualitas Layanan Pendidikan Tinggi

Kualitas layanan merupakan kekuatan strategis yang merupakan isu strategis utama dalam setiap organisasi. Hal ini juga berlaku pada institusi pendidikan tinggi. Saat ini, banyak perguruan tinggi yang didorong menuju kompetisi

komersial yang dipaksakan oleh tantangan lingkungan. Institusi perguruan tinggi, secara umum, perlu memperhatikan tidak hanya dengan apa yang masyarakat nilai dalam keterampilan dan kemampuan lulusan mereka, tetapi juga bagaimana para mahasiswa merasakan pengalaman pendidikan mereka (Bemowski, 1991). Hal ini juga sejalan dengan pendekatan manajemen kualitas total (TQM) yang digunakan oleh Owlia & Aspinwall (1997) dalam menilai pandangan berbagai profesional dan praktisi tentang kualitas dalam pendidikan tinggi. Penelitian mereka menemukan bahwa dari berbagai pelanggan pendidikan tinggi, mahasiswa mendapat peringkat tertinggi. Pengalaman mahasiswa di sebuah kampus menjadi isu kunci yang indikator kinerjanya harus diutamakan. Dengan demikian, persepsi mahasiswa tentang kualitas layanan kampus yang mereka terima merupakan hal penting yang harus diketahui oleh pihak penyelenggara pendidikan tinggi (Kimani et al., 2011).

Pada survei empiris yang dilakukan oleh Gamage et al. (2008) di Jepang dan Thailand, telah diidentifikasi total 10 faktor kualitas layanan yang dikonseptualisasikan. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kategori layanan, yaitu: aspek akademik, aspek non-akademik, dan aspek fasilitas. Kualitas layanan pendidikan tinggi tidak hanya berdampak pada kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan utama, tetapi juga berperan penting dalam mempertahankan reputasi dan daya saing institusi di pasar global yang semakin kompetitif (Teeroovengadum et al., 2016). Perubahan lanskap pendidikan akibat globalisasi, meningkatnya jumlah universitas swasta, dan berkurangnya dukungan pendanaan dari pemerintah menuntut perguruan tinggi untuk terus meningkatkan mutu layanan. Dalam hal ini, instrumen yang valid dan andal sangat dibutuhkan untuk mengukur kualitas layanan dari sudut pandang mahasiswa guna merencanakan serta mengevaluasi kebijakan peningkatan mutu. Model SERVQUAL, yang dikembangkan oleh Parasuraman et al. (1988), telah banyak digunakan, namun memiliki keterbatasan karena tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik pendidikan yang bersifat transformasional. Oleh karena itu, beberapa peneliti mencoba mengembangkan instrumen baru yang mencakup aspek kualitas proses dan hasil yang dihasilkan oleh institusi pendidikan tinggi.

Salah satu model terbaru adalah HESQUAL yang dikembangkan oleh Teeroovengadum et al. (2016), yang mengintegrasikan lima dimensi utama: kualitas administrasi, kualitas lingkungan fisik, kualitas pendidikan inti, kualitas fasilitas pendukung, dan kualitas transformasional. Setiap dimensi mencakup sub-dimensi yang lebih spesifik untuk menangkap persepsi mahasiswa dengan lebih rinci. Pendekatan ini tidak hanya mengevaluasi layanan administratif dan fasilitas pendukung, tetapi juga menekankan aspek transformasional yang mendorong perkembangan kemampuan berpikir kritis, kemandirian belajar, dan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Dengan demikian, HESQUAL memberikan kontribusi penting dalam pengukuran kualitas layanan di sektor pendidikan tinggi dan dapat menjadi dasar pengembangan strategi peningkatan mutu yang lebih komprehensif.

2.5. Teori Diskriminasi Harga dan Aksesibilitas Pendidikan Tinggi

Teori diskriminasi harga adalah konsep ekonomi yang mengacu pada praktik penetapan harga yang berbeda untuk konsumen yang berbeda, meskipun biaya produksi atau penyediaan barang atau layanan tersebut relatif sama. Tujuan dari diskriminasi harga untuk produsen yang bersifat komersial adalah untuk memaksimalkan total pendapatan penjualan dan keuntungan dari pasokan tertentu, dengan meminimalkan surplus konsumen para pembeli, yaitu perbedaan antara apa yang sebenarnya mereka bayar dan apa yang mereka bersedia bayar (Phillips, 2021).

Dalam konteks aksesibilitas pendidikan tinggi, teori diskriminasi harga mengacu pada konsep bahwa biaya pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi individu atau kelompok tertentu untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi tetap terjangkau bagi semua orang. Diskriminasi biaya Pendidikan ini ditujukan untuk mengurangi hambatan finansial yang mungkin menghalangi individu dari kelompok ekonomi rendah untuk mengakses pendidikan tinggi (Stiglitz, 1975).

Menurut Harrold (1976), tujuan penerapan diskriminasi harga pada bidang pendidikan dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas keuangan atas pendidikan bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu. Dalam konteks ini, diskriminasi harga dapat dipandang sebagai sarana untuk empat tujuan, yaitu:

1. untuk mempermudah anak-anak dari keluarga kurang mampu secara finansial untuk mendaftar di institusi pendidikan tersebut;
2. untuk mendapatkan jumlah peserta didik yang ditargetkan;
3. untuk menghasilkan pendapatan biaya yang cukup untuk memenuhi biaya mempertahankan standar pendidikan yang tinggi; dan
4. untuk membagi beban biaya antara orang tua sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar.

Di Indonesia, masalah aksesibilitas pendidikan masih menjadi masalah yang sering dibahas, khususnya untuk tingkat Pendidikan tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) tahun 2023 mencapai 31,45%, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023a). Walaupun mengalami peningkatan dari APK PT 2020-2022, yaitu 31,16%, namun, jika dilihat dari tantangan yang dihadapi Indonesia terkait bonus demografi, pencapaian APK tersebut masih dianggap kurang signifikan dalam menghadapi masalah demografi yang akan muncul. Berdasarkan proyeksi BPS, bonus demografi diprediksi akan terjadi di Indonesia antara tahun 2030 hingga 2045, yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang lebih besar daripada penduduk usia nonproduktif (65 tahun ke atas), dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia.

Selain itu, jika menilik lebih detail pada APK PT menurut kuintil pengeluaran, data BPS (2023b) menunjukkan bahwa proporsi terbesar pada APK PT tahun 2023 adalah pada kuintil 5, yaitu 52,66. Kuintil 5 adalah kelompok kuintil yang pengeluarannya tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan APK pendidikan tinggi, akses pendidikan tinggi cenderung terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu secara finansial, sehingga meningkatkan ketimpangan sosial.

Oleh karena itu, perlu turut campur tangan pemerintah dalam upaya meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi dan diharapkan dapat mengimbangi bonus demografi yang akan dihadapi. Salah satunya adalah dengan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai PNBP pada pendidikan tinggi BLU yang mengimplementasikan teori diskriminasi harga pada biaya pendidikan. Kebijakan UKT ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi aksesibilitas pendidikan tinggi di Indonesia.

2.6. Penelitian Terdahulu

Implementasi kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara menyeluruh di Indonesia masih belum banyak tersedia pada literatur, khususnya pada kasus Perguruan Tinggi milik pemerintah yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Studi di Indonesia terkait hasil UKT pun menemukan hasil yang berbeda-beda.

Pada lingkup Universitas Negeri Padang, Yanni et al. (2018) telah mengevaluasi persepsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) mengenai pelaksanaan dan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari segi kebijakan, proses penetapan besaran UKT, besaran UKT yang diterapkan, serta dampaknya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa PPKn menilai pelaksanaan dan kebijakan UKT di Universitas Negeri Padang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dinilai cukup efektif. Namun, masih perlu ditingkatkan sosialisasinya kepada mahasiswa agar pemahaman mereka terhadap kebijakan ini semakin baik. Selain itu, pelaksanaannya harus dimaksimalkan agar dapat mencapai sasaran yang tepat dan optimal.

Sejalan dengan hal tersebut, studi oleh Yanti (2023) pada IAIN Parepare menunjukkan bahwa penetapan nilai UKT telah berdasarkan pada Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi (SSBOPT). Adapun faktor yang mempengaruhi penetapan nilai UKT yaitu akreditasi prodi, kemahalan wilayah, dan juga kondisi ekonomi mahasiswa. Terakhir, faktor mempengaruhi terbentuknya persepsi mahasiswa terhadap implementasi UKT meliputi faktor internal dan eksternal.

Namun, hal menarik ditunjukkan pada hasil penelitian Sumarno et al. (2017). Mereka menganalisis perbedaan dalam jumlah biaya kuliah tunggal dan non-kuliah tunggal; proporsi sumber daya dan alokasi dana sebelum dan setelah kebijakan biaya kuliah tunggal; dan kualitas layanan pendidikan oleh mahasiswa yang membayar biaya kuliah tunggal dan non-kuliah tunggal. Namun, penelitian tersebut hanya meliputi mahasiswa dan pemimpin di Universitas Riau. Dengan menggunakan analisis deskriptif dan uji beda, hasil studi tersebut menunjukkan bahwa jumlah uang kuliah tunggal (UKT) tidak jauh berbeda dari uang kuliah non-tunggal. Proporsi sumber dana dari masyarakat meningkat setelah kebijakan biaya kuliah tunggal, tetapi proporsi alokasi untuk biaya operasional menurun. Mahasiswa yang membayar dengan UKT memberi nilai kualitas layanan pendidikan lebih rendah daripada mahasiswa non-UKT dengan perbedaan yang signifikan. Namun menariknya, penelitian ini menemukan bahwa biaya kuliah tidak secara signifikan memengaruhi kualitas pendidikan layanan.

Terkait BLU pendidikan, belum terdapat kajian yang mengaitkan dengan implementasi UKT. Kurniawan & Sugiri (2021) mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator kinerja pelayanan yang diberikan oleh Fakultas Ilmu Sosial (FIS) sebagai unit kerja yang termasuk dalam BLU Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa IKM FIS UNY berada dalam kategori baik secara umum. Namun, aspek sistem mekanisme dan prosedur, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, serta penanganan pengaduan saran dan masukan masih dinilai dalam kategori kurang baik. Namun, kajian tersebut juga belum menyoroti UKT sebagai bagian dari instrument fiskal melalui PNBP.

Selain itu, belum ada studi yang membandingkan penerapan UKT ataupun kualitas layanan antar perguruan tinggi. Namun, studi pada negara-negara lain dapat memberikan tambahan referensi. Sebuah studi di Lebanon telah menganalisis perbedaan persepsi mahasiswa atas kepuasan dan kualitas pengalaman universitas mereka pada empat jenis model pendidikan tinggi (American, French, Egyptian, dan Lebanese) di Lebanon. Hasil studi oleh Issa Nauffal (2009) menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan yang signifikan di antara berbagai jenis lembaga dalam filsafat pendidikan, persepsi tujuan pendidikan tinggi, dan pendekatan pedagogis yang mereka adopsi, mahasiswa umumnya menyatakan kepuasan terhadap kualitas pendidikan universitas mereka.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa terhadap implementasi kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai PNPB pada pendidikan tinggi, mencakup kesesuaian penetapan kategori UKT yang mereka bayarkan, kepuasan atas kualitas layanan perguruan tinggi, serta tingkat aksesibilitas yang dirasakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena dalam populasi tertentu menggunakan data berupa angka atau statistik (Creswell & Creswell, 2018).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan *Importance-Performance Analysis (IPA)* dan *Customer Satisfaction Index (CSI)* sebagai alat analisis. IPA digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pentingnya suatu atribut layanan dan kinerja aktualnya (Martilla & James, 1977). Sementara itu, CSI digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa secara keseluruhan terhadap layanan pendidikan yang diterima (Johnson et al., 2001). Dengan kombinasi metode ini, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai pengalaman mahasiswa terhadap kebijakan UKT di perguruan tinggi.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Untuk meningkatkan validitas dan memungkinkan generalisasi temuan kepada populasi mahasiswa dari berbagai PTN dan PTKIN BLU di Indonesia, sampel perguruan tinggi harus dipilih dengan seksama. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling*, tepatnya *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* dipilih untuk memastikan keterwakilan dari berbagai karakteristik penting untuk mencakup berbagai jenis perguruan tinggi BLU di Indonesia (Given, 2012). Oleh karena keterbatasan waktu dan sumber daya, untuk sampel perguruan tinggi akan dipilih 10 (sepuluh) perguruan tinggi BLU dengan berbagai jenis kriteria inklusi. Kriteria inklusi tersebut mencakup variasi dalam ukuran, wilayah lokasi kampus, dan kementerian induk. Pilihan ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi bagaimana karakteristik yang berbeda ini memengaruhi hasil implementasi kebijakan UKT.

Ukuran perguruan tinggi direpresentasikan oleh jumlah mahasiswa pada Jurusan/Fakultas, yang dibagi menjadi 3 (tiga) kategori seperti yang digunakan dalam Waluyo (2018) dengan sedikit penyesuaian menjadi: 1) kecil, yaitu kurang dari 15.000 mahasiswa; 2) sedang, yaitu 15.000-30.000 mahasiswa; dan 3) besar, yaitu lebih dari 30.000 mahasiswa.

Kemudian, untuk wilayah lokasi kampus dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: 1) Jawa dan Sumatera, yaitu perguruan tinggi yang memiliki kampus utama di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera; dan 2) Non Jawa dan Sumatera, yaitu perguruan tinggi yang memiliki kampus utama di luar wilayah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Terakhir, untuk variasi kementerian induk, dalam penelitian ini dibatasi 2 (dua) kementerian, yaitu: 1) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai kementerian induk dari PTN-BLU; dan 2) Kementerian Agama (Kemenag) sebagai kementerian induk PTKIN-BLU. Pemilihan PTN dan PTKIN sebagai studi kasus untuk merepresentasikan penyelenggara pendidikan tinggi (kampus) yang berstatus BLU dikarenakan kedua tipe tersebut merupakan tipe terbanyak. Dari 141 BLU di bidang Pendidikan per April 2024, sebanyak 48 kampus (34,04%) merupakan PTN-BLU dan 28 kampus (19,85%) berstatus PTKIN-BLU, sedangkan sisanya adalah institusi pendidikan yang berada di bawah berbagai Kementerian/Lembaga.

Dengan memperhatikan keterwakilan ketiga kriteria inklusi yang telah dilakukan, penelitian ini menggunakan 10 sampel perguruan tinggi BLU seperti tersaji pada Tabel 1. Di sisi lain, dalam pemilihan mahasiswa, perhatian khusus terhadap teknik sampling tidak diperlukan, karena populasi target terdiri dari semua mahasiswa pada sampel perguruan tinggi yang dipilih, jika mereka memenuhi kriteria yang ditentukan (Creswell, 2012). Kriteria dalam pemilihan sampel ini adalah meliputi:

1. Mahasiswa aktif pada 10 perguruan tinggi BLU yang menjadi sampel;
2. Mahasiswa program studi diploma atau sarjana di bawah Jurusan Akuntansi/ Fakultas Ekonomi/ Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam; dan
3. Mahasiswa penerimaan Tahun Akademik 2022/2023 atau 2023/2024.

Pemilihan kriteria kedua dilakukan untuk memastikan kesetaraan lingkup studi, sehingga program studi yang diteliti berada dalam bidang akademik yang serupa. Hal ini bertujuan untuk memudahkan perbandingan antara responden yang berasal dari institusi yang berbeda serta untuk mengurangi potensi bias yang muncul akibat perbedaan karakteristik antar program studi yang tidak sebanding (Bryman, 2012). Dengan memilih program studi di bawah fakultas yang memiliki disiplin ilmu serupa, analisis yang dilakukan dapat lebih fokus pada variabel-variabel yang relevan dan menghasilkan kesimpulan yang lebih valid (Creswell & Creswell, 2018).

Kemudian, kriteria ketiga dipilih untuk memastikan bahwa responden telah melewati minimal 1 (satu) tahun pengalaman pendidikan tinggi di kampus, sehingga memungkinkan mereka untuk memberikan tanggapan yang lebih rasional dan masukan yang valid saat melengkapi kuesioner (Fraenkel & Wallen, 2012). Selain itu, kriteria ini juga ditetapkan untuk menghindari responden yang mungkin terdampak oleh pandemi COVID-19, karena mahasiswa yang baru mulai kuliah pada tahun-tahun sebelumnya mungkin memiliki pengalaman yang berbeda akibat pembelajaran

daring dan kondisi ekonomi. Dari kriteria tersebut, terdapat 712 orang mahasiswa yang tersebar di 10 sampel perguruan tinggi BLU yang menjadi sampel penelitian ini.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pendekatan kuantitatif digunakan dengan memanfaatkan data primer yang dikumpulkan secara langsung dari responden untuk menjawab pertanyaan penelitian (Sekaran & Bougie, 2016). Pengumpulan data primer ini dilakukan melalui kuesioner yang dipilih karena mampu mengumpulkan informasi dari sejumlah besar responden dalam waktu yang relatif singkat dan dengan biaya yang efisien, serta memungkinkan peneliti untuk mengkuantifikasi jawaban responden secara objektif (Creswell & Creswell, 2018).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang didistribusikan secara daring menggunakan *Microsoft Forms*. Metode daring ini dipilih karena keunggulannya dalam menjangkau responden dari berbagai lokasi dengan efisiensi yang tinggi, memungkinkan penyebaran kuesioner secara luas tanpa batasan geografis dan memberikan fleksibilitas waktu bagi responden untuk mengisi kuesioner (Hair et al., 2014; Wright, 2005). Metode ini juga mengurangi risiko kesalahan input manual dan mempercepat proses pengolahan data karena respons responden langsung tercatat secara otomatis dalam format digital (Saunders et al., 2009).

Sesuai dengan tujuan penelitian, kuesioner terdiri dari tiga bagian inti:

1. Kesesuaian penetapan kelompok UKT

Dalam melihat dimensi ini, item pertanyaan kuesioner akan disusun berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kebijakan UKT baik untuk PTN maupun PTKIN BLU.

2. Kualitas layanan perguruan tinggi

Untuk melihat persepsi mahasiswa atas tingkat kepentingan dan kualitas layanan perguruan tingginya, penelitian ini akan mengadopsi model HESQUAL yang dikembangkan oleh Teeroovengadum et al. (2016). Model tersebut menggunakan lima dimensi utama: kualitas administrasi, kualitas lingkungan fisik, kualitas pendidikan inti, kualitas fasilitas pendukung, dan kualitas transformasional dengan total 48 indikator pengukuran. Kemudian, indikator tersebut disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi di Indonesia yang menghasilkan 44 indikator. Pada bagian ini juga responden diminta mengisi tingkat kepuasan terhadap layanan perguruan tinggi secara keseluruhan.

3. Aksesibilitas terhadap biaya UKT

Merujuk pada teori diskriminasi harga, seharusnya penerapan UKT dapat memperbaiki tingkat aksesibilitas pendidikan tinggi. Untuk itu, pada bagian ini responden akan diberikan pertanyaan terkait kemampuan mereka dalam memenuhi pembayaran UKT yang telah ditetapkan, yaitu meliputi:

- a. Sumber dana pembayaran UKT (ortu/bekerja/beasiswa/utang);
- b. Pernah mendapat keringanan pembayaran UKT;
- c. Cuti karena tidak dapat membayar UKT; dan
- d. Berhenti kuliah karena tidak dapat membayar UKT.

Pada pertanyaan terkait kualitas layanan perguruan tinggi, digunakan dua jenis skala Likert 6 poin untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel yang diteliti, yaitu Skor Kepentingan dan Skor Kenyataan. Skor Kepentingan digunakan untuk mengetahui seberapa penting setiap atribut atau indikator layanan dari sudut pandang responden, dengan skala yang dimulai dari 1="Sangat Tidak Penting" hingga 6="Sangat Penting." Skala ini memungkinkan peneliti untuk menangkap intensitas penilaian responden terhadap aspek-aspek tertentu yang dianggap penting dalam konteks layanan yang diberikan (Likert, 1932). Sementara itu, Skor Kenyataan digunakan untuk menilai persepsi responden tentang kualitas aktual yang mereka alami dengan pilihan mulai dari 1="Sangat Tidak Baik" hingga 6="Sangat Baik." Selain itu, mahasiswa juga diminta untuk memberikan komentar independen mereka sendiri atas pertanyaan terbuka pada masing-masing aspek penilaian.

Pemilihan skala dengan 6 poin dilakukan untuk menghindari adanya pilihan tengah (netral) yang sering kali dipilih responden saat mereka ragu atau tidak memiliki pendapat yang kuat (Chomeya, 2010). Metode pengukuran ini efektif dalam mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan kenyataan, yang kemudian digunakan dalam analisis *Importance-Performance Analysis* (IPA) untuk mengetahui prioritas perbaikan layanan (Martilla & James, 1977).

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa dokumen regulasi serta penetapan tarif dan kelompok UKT pada masing-masing perguruan tinggi. Dokumen regulasi dikumpulkan melalui situs repositori Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan. Kemudian, untuk dokumen lainnya diperoleh melalui korespondensi dengan masing-masing perguruan tinggi.

3.4. Metode Analisis Data

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak *Microsoft Excel* dan SPSS. Adapun tahapan analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Uji keterbacaan

Uji keterbacaan dilakukan untuk memastikan setiap item dalam kuesioner dapat dipahami oleh responden, sehingga meminimalkan risiko kesalahpahaman yang dapat memengaruhi kualitas data (Sekaran & Bougie, 2016).

Instrumen yang jelas dan mudah dipahami akan membantu responden menjawab pertanyaan dengan akurat, sehingga hasil penelitian lebih valid (Creswell & Creswell, 2018).

Dalam penelitian ini, uji keterbacaan melibatkan 21 mahasiswa dari perguruan tinggi yang menjadi sampel penelitian. Mereka diminta memberikan umpan balik terhadap kejelasan setiap item kuesioner untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bagian yang ambigu sebelum kuesioner disebarluaskan (Babbie, 2021). Langkah ini penting untuk memastikan setiap pernyataan dapat merefleksikan maksud peneliti dengan tepat.

b. Uji validitas dan reliabilitas

Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa setiap item dalam kuesioner mampu mengukur konstruk yang seharusnya diukur secara tepat (Sekaran & Bougie, 2016). Pada penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan menghitung nilai r korelasi antara setiap item hasil kuesioner dengan nilai total item setiap aspek pada persepsi kenyataan (*Performance*). Pendekatan ini dikenal sebagai uji validitas butir, yang digunakan untuk melihat sejauh mana item-item dalam kuesioner berkorelasi dengan total skor yang diharapkan (Ghozali, 2018). Suatu item dinyatakan valid jika nilai r korelasinya signifikan pada tingkat kepercayaan 95% atau $p < 0,05$ (Sugiyono, 2013). Jika nilai korelasi antara setiap item dengan total skor signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa item tersebut mampu merepresentasikan konstruk yang diukur.

Sementara itu, uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi hasil yang diberikan oleh instrumen penelitian jika digunakan secara berulang-ulang dalam kondisi yang sama (Hair et al., 2014). Pada penelitian ini, reliabilitas diuji menggunakan koefisien Cronbach's Alpha, di mana instrumen dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,7 (Tavakol & Dennick, 2011). Koefisien ini menunjukkan konsistensi internal dari setiap item dalam kuesioner. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai Cronbach's Alpha, semakin baik reliabilitas instrumen tersebut dalam mengukur variabel-variabel yang diteliti secara konsisten. Kombinasi dari uji validitas dan reliabilitas ini memberikan jaminan bahwa data yang dikumpulkan dapat diandalkan dan mewakili konsep yang diukur dengan akurat.

c. Analisis deskriptif

Analisis deskriptif merupakan teknik yang digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai karakteristik responden dan indikator yang diteliti melalui penyajian data secara sistematis (Creswell, 2012). Teknik ini melibatkan perhitungan dan penyajian statistik deskriptif seperti rata-rata (*mean*), median, modus, standar deviasi, dan rentang (*range*) yang digunakan untuk menganalisis kecenderungan sentral, variabilitas, dan penyebaran data (Sekaran & Bougie, 2016). Selain itu, analisis ini juga mencakup distribusi frekuensi dan persentase untuk melihat proporsi karakteristik responden dalam berbagai kategori seperti usia, jenis kelamin, dan kelompok UKT (Field, 2018). Teknik analisis ini akan digunakan untuk menjawab keempat pertanyaan pada penelitian ini.

d. Importance-Performance Analysis (IPA)

Untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua terkait persepsi atas kepentingan dan performa layanan perguruan tinggi, hasil analisis deskriptif akan dilengkapi dengan analisis pendekatan IPA. IPA merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi atribut-atribut layanan berdasarkan dua dimensi utama, yaitu tingkat kepentingan (*importance*) dan tingkat kinerja (*performance*) (Martilla & James, 1977). Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu layanan atau produk dengan memetakan hasil evaluasi ke dalam diagram dua dimensi, yang terdiri dari empat kuadran: (1) Kuadran I (*Keep Up the Good Work*) menunjukkan atribut dengan tingkat kepentingan dan kinerja yang tinggi, (2) Kuadran II (*Concentrate Here*) mencakup atribut yang penting tetapi memiliki kinerja rendah, yang membutuhkan perhatian prioritas, (3) Kuadran III (*Low Priority*) mencakup atribut yang tidak begitu penting dan memiliki kinerja rendah, dan (4) Kuadran IV (*Possible Overkill*) adalah atribut dengan kinerja tinggi tetapi kepentingannya rendah (Azzopardi & Nash, 2013). IPA membantu organisasi mengalokasikan sumber daya secara efektif dengan fokus pada atribut yang penting tetapi kinerjanya masih rendah, sehingga strategi peningkatan dapat dilakukan secara efisien (Slack, 1994).

e. Customer Satisfaction Index (CSI)

CSI merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan secara keseluruhan terhadap suatu produk atau layanan berdasarkan persepsi mereka terhadap berbagai atribut yang dianggap penting (Johnson et al., 2001). Indeks ini akan digunakan untuk melengkapi hasil analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan ketiga terkait persepsi atas kepuasan layanan perguruan tinggi secara keseluruhan. CSI dihitung dengan mengalikan nilai kepuasan pada setiap atribut dengan bobot kepentingannya, kemudian menjumlahkan hasilnya untuk mendapatkan indeks komposit (Fornell et al., 1996). Langkah-langkah menghitung CSI menurut Ghozi & Rakim (2019) adalah sebagai berikut.

- 1) Menghitung *Mean Importance Score* (MIS) tiap-tiap butir pertanyaan.
- 2) Menghitung *Weight Factors* (WF) per butir pertanyaan. Bobot ini merupakan persentase nilai MIS per butir pertanyaan terhadap total MIS seluruh item.
- 3) Menghitung *Mean Satisfaction Score* (MSS) tiap butir pertanyaan.
- 4) Menghitung *Weight Score* (WS) tiap butir pertanyaan. Bobot ini merupakan perkalian antara WF dengan MSS.
- 5) Menghitung *Customer Satisfaction Index* (CSI), dengan rumus:

$$CSI = \frac{\sum_{i=1}^n WS_i}{HS} \times 100\%$$

di mana: HS (*Highest Scale*) adalah skala maksimum.

Indeks ini memiliki rentang antara 0-100%, dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori kepuasan (Listifadah, 2021), yaitu:

- 1) Sangat Puas: rentang 81% – 100%.
- 2) Puas: rentang 66% – 80%.
- 3) Cukup Puas: rentang 51% – 65%.
- 4) Kurang Puas: rentang 35% – 50%.
- 5) Tidak Puas: rentang 0% – 34%.

Rentang ini dapat digunakan untuk menginterpretasikan hasil CSI dalam menentukan kondisi kepuasan pelanggan secara keseluruhan.

Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil interpretasi tersebut juga ditriangulasi dengan data-data yang sekunder yang telah dikumpulkan untuk mengkonfirmasi atau menguatkan hasil temuan.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Responden

Data utama penelitian ini didapat dari kuesioner yang disebarkan pada sepuluh perguruan tinggi seperti tersaji pada Tabel 1. Adapun jumlah responden adalah 712 orang mahasiswa dengan profil demografi tersaji dalam Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2, profil responden yang terdiri dari 712 mahasiswa menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah perempuan, dengan jumlah 526 orang (73,88%), sedangkan laki-laki hanya 186 orang (26,12%). Dari segi penghasilan orang tua, sebagian besar responden berasal dari keluarga dengan penghasilan di bawah Rp5.000.000, yaitu sebanyak 580 orang (81,46%), sedangkan hanya sebagian kecil yang berasal dari keluarga dengan penghasilan di atas Rp30.000.000 (1,12%).

Kemudian dari segi jalur seleksi masuk, terdapat variasi yang cukup besar, dengan mayoritas mahasiswa diterima melalui seleksi berdasarkan tes (41,57%), disusul jalur mandiri (30,06%), dan seleksi berdasarkan prestasi (27,39%). Selain itu, 59,69% responden berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN), sementara 40,31% berasal dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Wilayah distribusi kampus pun cukup beragam, dengan responden terbanyak berasal dari kampus di Pulau Jawa (31,60%), diikuti oleh Sulawesi (27,25%), dan Sumatera (25%).

4.2. Profil Tarif UKT

Walaupun responden merupakan mahasiswa dari Fakultas/Jurusan dengan rumpun yang sama, tetapi perbedaan asal perguruan tinggi mengakibatkan perbedaan besaran UKT pada kelompok yang sama. Rata-rata tarif UKT untuk tahun akademik 2022/2023 dan 2023/2024 pada program studi di bawah Jurusan Akuntansi/ Fakultas Ekonomi/ Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada sepuluh perguruan tinggi sampel terangkum pada Tabel 3.

Dari Tabel 3 dapat terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan nominal yang berarti antara tarif TA 2022/2023 dan TA 2023/2024. Hal ini dikarenakan dari sepuluh perguruan tinggi, hanya 1 (satu) perguruan tinggi sampel yang menerapkan kenaikan tarif UKT untuk TA 2023/2024, yaitu perguruan tinggi AD.

Hal menarik yang dapat diamati dari Tabel 3 adalah nilai maksimal pada tarif UKT Kelompok 8 lebih kecil dibandingkan Kelompok 6 dan 7. Hal ini disebabkan hanya terdapat 2 (dua) perguruan tinggi sampel yang menerapkan 8 (delapan) kelompok UKT, yaitu perguruan tinggi, yaitu PD dan PF. Satu perguruan tinggi menerapkan 6 (enam) kelompok UKT, dan 7 (tujuh) perguruan tinggi lainnya mengkategorikan menjadi 7 (tujuh) kelompok UKT.

Adapun tarif UKT tertinggi ada pada Kelompok 7 dengan nilai Rp8.305.000 yaitu pada perguruan tinggi AC. Di sisi lain, tarif terendah tentunya berada pada Kelompok 1 yaitu Rp400.000 untuk seluruh PTKIN sampel. Hal ini sesuai dengan batas atas tarif Kelompok 1 yang diatur melalui Peraturan Menteri Agama.

4.3. Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Hasil uji validitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua item dalam kuesioner memiliki nilai *r* korelasi yang signifikan pada tingkat kepercayaan 95% ($p < 0,05$), yang berarti setiap item berkorelasi positif dengan total skor pada persepsi kinerja (Sugiyono, 2013). Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen yang digunakan valid dan mampu mengukur konstruk yang diinginkan secara akurat.

Sementara itu, uji reliabilitas yang dihitung menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha* pada seluruh item per aspek menghasilkan nilai berkisar 0,903-0,940 untuk semua item pertanyaan pada kuesioner, yang menunjukkan bahwa instrumen tersebut memiliki konsistensi internal yang baik (Tavakol & Dennick, 2011). Dengan nilai *Cronbach's Alpha* yang tinggi, dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap setiap item dalam kuesioner adalah stabil

dan konsisten, yang berarti bahwa instrumen ini reliabel dan dapat diandalkan untuk digunakan dalam penelitian lebih lanjut.

4.4. Persepsi Mahasiswa atas Kesesuaian Penetapan Kelompok UKT

Untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa atas penetapan Kelompok UKT, dilakukan survei kepada responden dengan item pertanyaan yang meliputi persepsi atas pemahaman indikator/kriteria penetapan kelompok UKT, kesesuaian penetapan kelompok UKT dengan profil sosioekonomi, adanya kesempatan untuk melakukan banding kelompok UKT, dan pemrosesan pengajuan banding tersebut. Hasil survei tersebut tersaji pada Tabel 4.

Berdasarkan temuan dari Tabel 4, meskipun mayoritas mahasiswa memahami kriteria penetapan UKT (66,43%), masih terdapat 33,57% mahasiswa yang belum memahami indikator penetapan UKT secara jelas. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketentuan kriteria penetapan UKT nya belum tersosialisasi dengan baik. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan kenyataan bahwa dari 10 (sepuluh) perguruan tinggi sampel, hanya 4 (empat) memiliki dokumen formal yang ditandatangani pimpinan BLU, seperti keputusan atau pengumuman, yang memuat informasi indikator penetapan UKT ini.

Kemudian, melalui butir pertanyaan persepsi: *"Apakah kelompok UKT yang Anda bayarkan sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga Anda?"* dengan pilihan jawaban "sesuai" atau "tidak sesuai", mayoritas sebanyak 55,20% responden menyatakan kelompok UKT tidak sesuai dengan profil sosioekonomi keluarga mereka. Hasil survei kepada responden yang sama atas kategori penghasilan dan kelompok UKT yang dibayarkan kategori penghasilan menguatkan persepsi tersebut. Dari data yang tersaji pada Tabel 5, dapat terlihat bahwa dari 580 mahasiswa yang menyatakan penghasilan orang tua di bawah Rp5.000.000 (kelompok penghasilan kecil), hanya 169 mahasiswa (29,14%) yang membayar UKT pada kelompok terbawah (Kelompok 1 dan 2), sedangkan 64,48%-nya harus membayar UKT pada Kelompok 3 ke atas, di mana rata-rata besaran UKT sudah mencapai Rp2.556.563 ke atas (lihat Tabel 3).

Selain itu, meskipun 66,57% responden menyatakan sudah ada mekanisme peninjauan, masih ada sebagian responden (10,13%) yang menilai proses peninjauan kembali atau banding belum dilakukan secara adil. Temuan ini memiliki implikasi signifikan dalam konteks UKT sebagai PNBP BLU. Penetapan UKT yang tidak sesuai dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam implementasi prinsip keadilan dan aksesibilitas dalam pemungutan PNBP dari masyarakat. Meskipun BLU diberikan fleksibilitas untuk menetapkan tarif layanan berdasarkan praktik bisnis yang sehat, prinsip *not for profit* dan pelayanan publik tetap harus menjadi prioritas. Ketidaksesuaian ini dapat memicu pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam proses penentuan tarif UKT, yang merupakan bagian dari pengelolaan pendapatan BLU. Persepsi ini juga menyoroti potensi ketidakselarasan antara tujuan kebijakan UKT untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi dengan realitas ekonomi mahasiswa. Dari sudut pandang pengelolaan keuangan negara, hal ini dapat berdampak pada efektivitas alokasi sumber daya dan pencapaian tujuan pembangunan SDM. Jika UKT yang merupakan PNBP BLU tidak mencerminkan kemampuan bayar masyarakat, maka potensi penerimaan dapat terganggu, atau bahkan dapat menimbulkan beban finansial yang tidak proporsional bagi mahasiswa, yang pada akhirnya dapat menghambat akses pendidikan.

Dengan demikian, diperlukan peningkatan transparansi dan kejelasan dalam komunikasi mengenai indikator penetapan UKT. Sosialisasi yang lebih komprehensif harus dilakukan untuk memastikan seluruh mahasiswa, terutama mereka yang baru masuk, memahami dengan baik bagaimana UKT ditetapkan berdasarkan kondisi sosioekonomi. Selain itu, sistem peninjauan kembali harus dievaluasi agar lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kondisi mahasiswa yang memerlukan penyesuaian. Kemudian yang paling utama, pengelola perguruan tinggi harus melakukan perbaikan dalam mekanisme verifikasi data sosioekonomi mahasiswa, sehingga kelompok UKT yang ditetapkan dapat lebih adil dan mencerminkan kondisi sosioekonomi keluarga masing-masing mahasiswa. Dengan perbaikan-perbaikan tersebut, kebijakan UKT diharapkan dapat lebih diterima dan dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan dalam pendidikan tinggi (Harrold, 1976; Stiglitz, 1975).

4.5. Persepsi Mahasiswa atas Kepentingan dan Performa Layanan Perguruan Tinggi

Selanjutnya penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui persepsi mahasiswa atas kepentingan dan performa layanan perguruan tinggi dikaitkan dengan besaran UKT yang mereka bayarkan. Dari hasil kuesioner terhadap 5 (lima) aspek layanan perguruan tinggi yang terdiri dari 44 indikator pertanyaan, dilakukan analisis sebagai berikut.

a. Uji Kesenjangan (*Gap*)

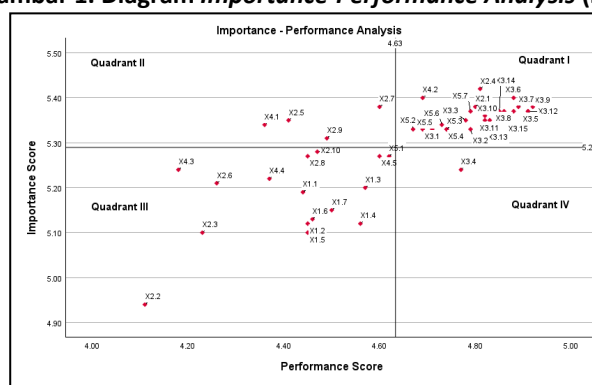
Dari Tabel 6 terlihat bahwa semua item pertanyaan memiliki nilai kesenjangan (*gap*) negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan mempertimbangkan besaran UKT yang dibayarkan, responden mempersepsikan nilai kinerja pelayanan masih berada di bawah tingkat kepentingannya. Adapun dari 5 aspek yang diamati, kesenjangan terbesar ada pada aspek kualitas fasilitas pendukung (-0,8528) dan aspek kualitas fisik lingkungan kampus (-0,8013). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut memiliki tingkat kepentingan yang tinggi, namun kenyataan kinerja kualitas pelayanannya belum cukup memenuhi harapan.

Lebih lanjut, hasil uji perbedaan menggunakan *paired t-test* menunjukkan bahwa perbedaan antara persepsi kepentingan dan kinerja tersebut signifikan pada taraf kepercayaan $\alpha = 5\%$. Hal ini menguatkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata dan konsisten secara statistik antara tingkat kepentingan (*Importance*) dan persepsi kenyataan kinerja (*Performance*). Temuan ini mengindikasikan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk melakukan perbaikan dalam layanan yang diberikan guna memenuhi ekspektasi mahasiswa. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan tujuan utama kelembagaan BLU, manajemen perguruan tinggi perlu fokus pada aspek layanan yang memiliki kesenjangan terbesar (Kurniawan & Sugiri, 2021).

b. Importance-Performance Analysis (IPA)

Selanjutnya, dengan menggunakan pendekatan IPA yang dikenalkan Martilla & James (1977), skor persepsi kepentingan (*Importance*) dan kenyataan kinerja (*Performance*) hasil kuesioner diolah menjadi diagram dengan empat kuadran yang tersaji pada Gambar 1. Dari Gambar 1, dapat diketahui bahwa dari 44 indikator pertanyaan terkait lima aspek kualitas layanan perguruan tinggi, 23 indikator berada pada Kuadran I (*Keep Up The Good Work*) yang artinya indikator-indikator tersebut dinilai penting dan telah memuaskan pengguna karena telah dijalankan dengan baik. Responden menganggap bahwa atribut-atribut dalam kuadran ini perlu dijaga kualitas kinerjanya, karena tingkat kepentingannya yang tinggi dan layanan yang ada sudah dianggap baik menurut persepsi pengguna (Listifadah, 2021). Indikator yang termasuk dalam kuadran III meliputi X2.1, X2.4, X3.1, X3.2, X3.3, X3.5, X3.6, X3.7, X3.8, X3.9, X3.10, X3.11, X3.12, X3.13, X3.14, X3.15, X4.2, X5.2, X5.3, X5.4, X5.5, X5.6, dan X5.7.

Gambar 1. Diagram Importance-Performance Analysis (IPA)



Sumber: Diolah Penulis

Selanjutnya, terdapat 4 indikator yang berada pada Kuadran II (*Concentrate Here*). Pada indikator yang berada pada kuadran inilah, manajemen perguruan tinggi harus fokus melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanannya (Slack, 1994). Hal ini dikarenakan pelanggan menilai indikator pada kuadran ini memiliki nilai kepentingan tinggi, namun kenyataan kinerjanya belum dilaksanakan dengan baik. Adapun indikator yang berada pada kuadran ini adalah:

- X2.5 Memiliki ruang kuliah yang memadai
- X2.7 Ketersediaan alat dan perlengkapan mengajar yang memadai (misalnya proyektor, papan tulis)
- X2.9 Keamanan dan keselamatan di area kampus
- X4.1 Ketersediaan fasilitas teknologi informasi (TI) yang memadai (komputer, internet/*Wi-Fi*, *software* terkait pembelajaran)

Kemudian, pada Kuadran III (*Low Priority*) terdapat 16 indikator. Kuadran III menggambarkan indikator-indikator yang dianggap kurang penting oleh pengguna dan pelaksanaannya belum optimal. Walaupun nilai kinerjanya masih dipersepsikan rendah oleh pengguna, tetapi peningkatan kualitas pada indikator dalam kuadran ini belum menjadi prioritas karena tingkat kepentingannya dinilai rendah (Listifadah, 2021). Indikator yang termasuk dalam kuadran III meliputi X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, X1.6, X1.7, X2.2, X2.3, X2.6, X2.8, X2.10, X4.3, X4.4, X4.5, dan X5.1.

Terakhir, hanya terdapat 1 indikator yang berada pada Kuadran IV (*Possible Overkill*), yaitu X3.4 Sikap dosen menunjukkan perilaku yang tidak bias dan tidak diskriminatif pada mahasiswa. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi sumber daya organisasi yang berfokus pada indikator tersebut berlebihan dan tidak sesuai dengan prioritas. Sebaiknya, sumber daya tersebut dialokasikan pada area lain yang lebih membutuhkan (Slack, 1994).

Hasil analisis kuadran IPA tersebut sejalan dengan hasil analisis kesenjangan sebelumnya, di mana Kuadran II meliputi indikator pada aspek kualitas fasilitas pendukung dan aspek kualitas fisik lingkungan kampus yang merupakan dua aspek yang memiliki kesenjangan terbesar antara nilai kepentingan dan kenyataan kinerja. Temuan ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Ghazi & Rakhman Rakim (2019).

Analisis kuadran IPA memberikan info lebih detail terkait indikator mana yang prioritas untuk diperbaiki pada kedua aspek tersebut. Pada aspek kualitas fasilitas pendukung, manajemen perguruan tinggi BLU harus berfokus pada peningkatan ketersediaan fasilitas teknologi informasi yang memadai, meliputi komputer, internet/*Wi-Fi*, *software* terkait pembelajaran. Sementara itu, pada aspek kualitas fisik lingkungan kampus, perguruan tinggi BLU harus

memprioritaskan pada ketersediaan ruang kuliah yang memadai, ketersediaan alat dan perlengkapan mengajar yang memadai (misalnya proyektor, papan tulis), serta keamanan dan keselamatan di area kampus.

4.6. Persepsi Mahasiswa atas Kepuasan Layanan Perguruan Tinggi

Selain melihat persepsi kenyataan kinerja atas layanan perguruan tinggi melalui 5 aspek pada model HESQUAL yang dikembangkan oleh Teeroovengadum et al. (2016), kuesioner pada penelitian ini juga meminta responden memberikan penilaian atas kepuasan layanan perguruan tinggi tempat mereka menempuh pendidikan tinggi secara keseluruhan. Adapun rekapitulasi persepsi atas tingkat kepuasan atas layanan tersaji pada Tabel 7.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan dengan mempertimbangkan besaran UKT yang dibayarkan, mayoritas responden (71,49%) merasa sangat puas dan puas dengan layanan perguruan tinggi BLU. Sementara itu, total sebanyak 28,51% masih merasa tidak puas dan sangat tidak puas. Hasil survei tersebut sesuai dengan hasil penghitungan *Customer Satisfaction Index* (CSI) yang mendapatkan nilai 77,27%. Nilai ini termasuk pada kategori Puas (Listifadah, 2021).

Walaupun hasil kuesioner dan CSI menunjukkan mayoritas mahasiswa menyatakan puas atas layanan perguruan tinggi, analisis kesenjangan dan IPA mengindikasikan kinerja layanan belum sepenuhnya memenuhi harapan, terutama dalam hal fasilitasi pendukung dan fisik kampus. Dalam kerangka PNPB BLU, temuan ini sangat relevan. Fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU seharusnya memungkinkan perguruan tinggi untuk secara efisien mengalokasikan dana PNPB (termasuk dari UKT) untuk peningkatan kualitas layanan dan infrastruktur. Jika ada kesenjangan antara harapan dan kinerja, ini dapat mengindikasikan

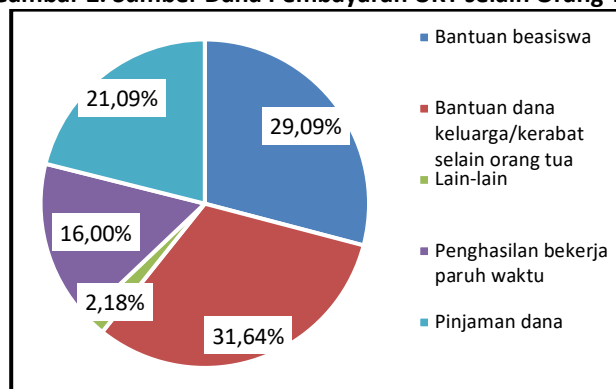
bahwa pemanfaatan dana PNPB BLU belum optimal atau belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan prioritas mahasiswa. Pengelolaan PNPB BLU yang efektif harus tercermin dalam peningkatan kualitas layanan publik yang diberikan. Dana yang terkumpul dari UKT, sebagai bagian dari PNPB, seharusnya digunakan untuk membiayai perbaikan dan pengembangan fasilitas, teknologi, serta sumber daya manusia yang secara langsung berdampak pada pengalaman belajar mahasiswa. Kesenjangan yang ditemukan menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap efisiensi dan efektivitas penggunaan dana PNPB BLU dalam mendukung peningkatan kualitas layanan, serta perlunya mekanisme umpan balik yang lebih kuat dari mahasiswa untuk menginformasikan prioritas pengeluaran.

4.7. Persepsi Mahasiswa atas Aksesibilitas Pembiayaan Pembayaran UKT Perguruan Tinggi

Selanjutnya, penelitian ini juga melihat pada aksesibilitas orang tua mahasiswa perguruan tinggi BLU untuk membiayai UKT secara penuh yang hasilnya tersaji pada Tabel 8. Berdasarkan data dari Tabel 8, terlihat bahwa sebagian besar mahasiswa mengandalkan berbagai sumber pendanaan selain orang tua untuk membayar UKT. Meskipun 71,35% responden menyatakan bahwa orang tua mereka mampu membiayai UKT secara penuh setiap semester, 28,65% mahasiswa mengalami kesulitan dalam hal ini dan harus mencari alternatif pendanaan.

Dari Gambar 2 dapat diketahui bahwa di antara sumber dana alternatif tersebut, 31,64% mahasiswa mendapatkan bantuan dari keluarga atau kerabat selain orang tua, menjadikannya sumber dana terbesar. Bantuan beasiswa juga merupakan sumber pendanaan penting bagi 29,09% mahasiswa, sementara 21,09% mengandalkan pinjaman dana. Selain itu, 16,00% mahasiswa menggunakan penghasilan dari pekerjaan paruh waktu untuk membantu menutupi biaya kuliah dan sebagian kecil mahasiswa (2,18%) menggunakan sumber dana lain-lain. Di sisi lain, hanya sebagian kecil mahasiswa yang kesulitan keuangan mendapatkan penurunan tarif atau keringanan UKT dari perguruan tinggi (15,20%), yang menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dalam membantu mahasiswa yang kesulitan membayar UKT.

Gambar 2. Sumber Dana Pembayaran UKT selain Orang Tua



Sumber: Diolah penulis

Selain itu, hanya 1 mahasiswa (0,49%) yang pernah melakukan cuti kuliah karena tidak mampu membayar UKT, sementara 203 mahasiswa lainnya (99,51%) tetap melanjutkan studi meski mengalami kesulitan keuangan. Namun, data menunjukkan bahwa sebanyak 96 mahasiswa (47,06%) pernah berpikir untuk berhenti kuliah akibat kesulitan membayar UKT, sementara 108 mahasiswa (52,94%) tidak mempertimbangkan untuk berhenti.

Fakta bahwa banyak mahasiswa bergantung pada sumber dana lain selain orang tua menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang harus diatasi untuk mencapai tujuan BLU Pendidikan. Ini menggarisbawahi pentingnya peran BLU dalam menciptakan keuangan yang inklusif di sektor pendidikan. Sebagai entitas yang mengelola PNPB, perguruan tinggi BLU memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan pembiayaan tidak menjadi hambatan bagi akses pendidikan. Fleksibilitas yang diberikan kepada BLU dalam pengelolaan keuangannya seharusnya juga dimanfaatkan untuk mengembangkan skema bantuan finansial, beasiswa, atau mekanisme pembayaran yang lebih adaptif bagi mahasiswa yang membutuhkan.

Dari perspektif pengelolaan keuangan negara, tantangan aksesibilitas ini dapat memengaruhi pencapaian tujuan pemerataan pendidikan. PNPB yang berasal dari UKT harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak hanya menopang operasional perguruan tinggi, tetapi juga mendukung keberlanjutan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini mungkin memerlukan peninjauan kembali terhadap kebijakan subsidi silang dalam UKT, serta eksplorasi sumber-sumber pembiayaan alternatif atau kemitraan dengan pihak ketiga untuk memperkuat dukungan finansial bagi mahasiswa.

4.8. Perbandingan Persepsi Mahasiswa berdasarkan Jenis Perguruan Tinggi

Selain melakukan analisis persepsi mahasiswa secara keseluruhan, penelitian ini juga melihat apakah ada variasi persepsi mahasiswa terkait hasil implementasi kebijakan UKT berdasarkan karakteristik perguruan tinggi. Pada subbab ini, dilakukan perbandingan persepsi mahasiswa berdasarkan jenis perguruan tinggi, yaitu PTN dan PTKIN, di mana terdapat 425 responden mahasiswa PTN dan 287 responden mahasiswa PTKIN.

Sebelum menganalisis persepsi mahasiswa, Tabel 9 memberikan informasi terkait profil besaran tarif UKT untuk tahun akademik 2023/2024 per kelompok jenis perguruan tinggi. Dari Tabel 9, dapat kita lihat bahwa rata-rata tarif UKT pada PTKIN lebih tinggi dibandingkan PTN pada hampir semua kelompok UKT. Hanya pada Kelompok 1 tarif rata-rata PTKIN lebih rendah dibandingkan PTN. Hal ini dapat terjadi karena ketentuan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 7 tahun 2018 hanya mengatur tarif maksimal UKT pada Kelompok 1, yaitu Rp400.000. Sementara itu, ketentuan yang berlaku untuk PTN, yaitu Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020, mengatur tarif paling tinggi untuk Kelompok 1 dan 2 adalah masing-masing Rp500.000 dan Rp1.000.000. Hal ini juga mengakibatkan adanya lonjakan besaran tarif yang cukup tajam dari Kelompok 1 ke Kelompok 2 pada PTKIN.

a. Persepsi Mahasiswa atas Kesesuaian Penentuan Kelompok UKT

Dari Tabel 10 dapat diketahui bahwa mayoritas responden sudah memahami kriteria penetapan kelompok UKT dengan proporsi responden PTKIN lebih tinggi, yaitu 67,94% untuk PTKIN dan 65,41% untuk PTN. Namun, proporsi responden PTKIN yang merasa penetapan besaran UKT sesuai dengan profil ekonomi keluarga mereka jauh lebih kecil dibandingkan mahasiswa PTN (PTKIN = 41,64% dan PTN = 47,06%). Artinya, meskipun pemahaman mahasiswa PTKIN terkait indikator penetapan kelompok UKT sedikit lebih tinggi, namun mayoritas responden mahasiswa PTKIN menganggap penentuan kelompok UKT belum sesuai dengan keadaan sosioekonomi keluarga. Hal ini dapat diindikasikan terjadi karena lebih tingginya besaran tarif UKT pada PTKIN untuk kelompok yang sama dengan PTN seperti terlihat pada Tabel 8.

Kemudian, kebijakan terkait dengan mekanisme banding atas penetapan kelompok UKT lebih banyak diketahui oleh mahasiswa PTN dibandingkan dengan mahasiswa PTKIN, yaitu sebesar 76,00% berbanding 52,61%. Begitu pula untuk persepsi mahasiswa PTN terhadap keadilan dalam proses banding yang diajukan, lebih tinggi daripada persepsi mahasiswa PTKIN (53,25%: 39,07%).

Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa pengambil kebijakan terkait tarif PTKIN dalam hal ini Kementerian Agama dan manajemen PTKIN perlu fokus mengevaluasi ulang kebijakan-kebijakan terkait tarif UKT, termasuk rentang besaran tarif untuk masing-masing kelompok UKT serta memastikan pengajuan banding oleh mahasiswa dapat diproses dengan adil agar UKT yang dibayarkan mahasiswa sesuai dengan kondisi sosioekonomi masing-masing keluarga sesuai dengan tujuan awal kebijakan UKT (Retnoningsih & Marom, 2017).

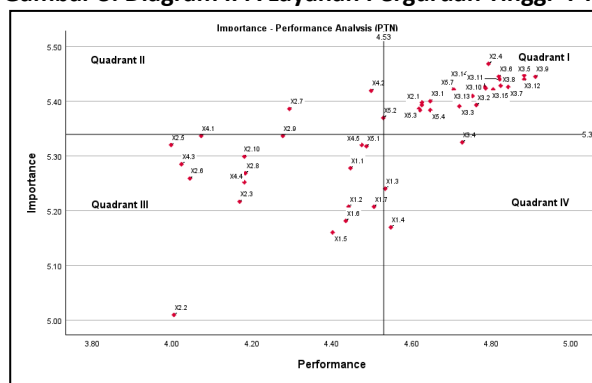
b. Persepsi Mahasiswa atas Kepentingan dan Performa Layanan Perguruan Tinggi

Dari kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) yang tersaji pada Gambar 3 dan 4 dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat kepentingan atas indikator layanan dinilai lebih tinggi oleh mahasiswa PTN (5,34) dibandingkan dengan mahasiswa PTKIN (5,21). Namun, rata-rata tingkat persepsi atas kenyataan kinerja layanan dari BLU dari mahasiswa PTN (4,53) lebih rendah dibandingkan persepsi mahasiswa PTKIN (4,78). Artinya, dengan besaran UKT yang dibayarkan, mahasiswa PTN memiliki harapan lebih tinggi atas kualitas layanan perguruan tingginya.

Berdasarkan Gambar 3, para manajemen PTN BLU perlu memprioritaskan perbaikan kualitas layanan pada indikator-indikator yang berada pada Kuadran II (*Concentrate Here*), yaitu:

- a. X2.7 Ketersediaan alat dan perlengkapan mengajar yang memadai (misalnya proyektor, papan tulis);
- b. X4.2 Ketersediaan fasilitas perpustakaan yang memadai; dan
- c. X5.2 Suasana Perguruan Tinggi yang mampu meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa

Gambar 3. Diagram IPA Layanan Perguruan Tinggi -PTN



Sumber: Diolah Penulis

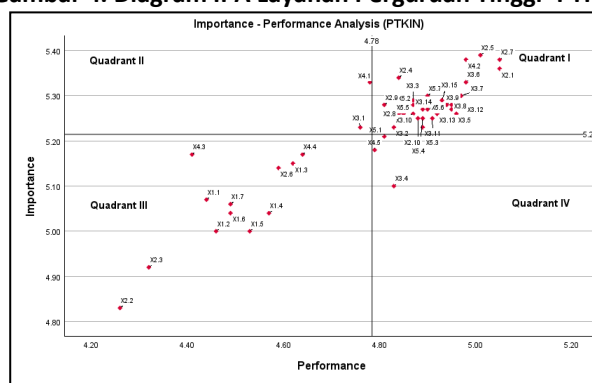
Hasil ini sedikit berbeda dengan analisis kuadran IPA secara keseluruhan yang ditunjukkan pada Gambar 1, di mana ketika responden hanya diambil mahasiswa PTN BLU ternyata Gambar 3 menunjukkan indikator kualitas fasilitas perpustakaan dan suasana untuk meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa masih perlu ditingkatkan.

Sementara itu, dari Gambar 4 menunjukkan bahwa kualitas layanan PTKIN BLU yang perlu difokuskan untuk ditingkatkan dalam rangka memenuhi kepuasan atas kepentingan mahasiswa, meliputi:

- X3.1 Sikap dosen menunjukkan minat dalam memahami dan memecahkan masalah mahasiswa; dan
- X4.1 Ketersediaan fasilitas teknologi informasi (TI) yang memadai (komputer, internet/*Wi-Fi*, *software* terkait pembelajaran).

Hasil ini juga berbeda dengan analisis kuadran IPA secara keseluruhan yang ditunjukkan pada Gambar 1, di mana ketika responden hanya diambil mahasiswa PTKIN BLU ternyata Gambar 4 menunjukkan indikator kualitas terkait sikap dosen untuk memahami permasalahan mahasiswa masih perlu ditingkatkan.

Gambar 4. Diagram IPA Layanan Perguruan Tinggi -PTKIN



Sumber: Diolah Penulis

c. Persepsi Mahasiswa atas Kepuasan Layanan Perguruan Tinggi

Dari hasil kuesioner persepsi mahasiswa atas kepuasan layanan perguruan tinggi diketahui bahwa mayoritas mahasiswa mempunyai kesan puas atas layanan perguruan tinggi baik PTN maupun PTKIN. Mahasiswa PTN yang merasakan sangat puas sebesar 7,06% dan puas sebesar 61,88% (total 68,94%). Sementara itu, mahasiswa PTKIN yang merasa sangat puas lebih banyak dibanding mahasiswa PTN, yaitu sebesar 15,33%; namun untuk yang merasakan puas lebih sedikit yaitu sebesar 59,93% (total 75,26%). Ini artinya lebih besar proporsi mahasiswa PTKIN yang merasa sangat puas atau puas atas kualitas layanan kampusnya dibanding mahasiswa PTN. Hal ini sesuai dengan hasil analisis kuadran IPA sebelumnya yang menunjukkan rata-rata skor kenyataan kinerja dari aspek kualitas layanan perguruan tinggi yang diberikan mahasiswa PTKIN lebih tinggi dibandingkan mahasiswa PTN.

Temuan tersebut juga didukung dengan perbandingan nilai CSI di mana indeks untuk PTKIN (79,82%) lebih tinggi dibandingkan nilai CSI untuk PTN (75,56%). Meskipun demikian, kedua nilai tersebut mempunyai kategori level kepuasan yang sama, yaitu kategori Puas (Listifadah, 2021). Dengan nilai kepuasan pada level tersebut, perguruan tinggi masih memiliki ruang untuk meningkatkan performanya.

d. Persepsi Mahasiswa atas Aksesibilitas Pembiayaan Pembayaran UKT Perguruan Tinggi

Selanjutnya, rekapitulasi kuesioner atas pertanyaan terkait aksesibilitas pendanaan untuk membiayai UKT untuk responden PTN dan PTKIN tersaji pada Tabel 11. Dari tabel tersebut diketahui bahwa mayoritas orang tua

mahasiswa baik dari PTN maupun PTKIN BLU (70,35% dan 72,82%) dapat membiayai UKT-nya. Kemudian, 17,46% mahasiswa PTN dan 11,54% mahasiswa PTKIN dari responden yang tidak dapat dibiayai UKT-nya oleh orang tua secara penuh, menyatakan pernah mendapatkan penurunan tarif UKT.

Lalu, kurang dari 1% dari mahasiswa PTN yang tidak dibiayai orang tua secara penuh pernah cuti kuliah, tetapi hampir 37%-nya pernah berpikir untuk berhenti kuliah karena tidak dapat membayar UKT. Sementara itu, dari mahasiswa PTKIN yang tidak dapat dibiayai penuh oleh orang tua, tidak ada yang cuti kuliah, tetapi 64,10%-nya pernah berpikir untuk berhenti kuliah karena tidak dapat membayar UKT. Persentase mahasiswa PTKIN yang menyatakan pernah berpikir berhenti kuliah jauh lebih tinggi dibandingkan mahasiswa PTN. Oleh karena itu, sangat penting bagi PTKIN untuk melakukan evaluasi atas kebijakan terkait UKT agar para mahasiswa tetap melanjutkan kuliahnya.

4.9. Perbandingan Persepsi Mahasiswa berdasarkan Wilayah

Pada subbab ini, dilakukan perbandingan antara persepsi mahasiswa berdasarkan lokasi perguruan tinggi, yaitu antara wilayah Jawa-Sumatera dan wilayah non Jawa-Sumatera, dengan masing-masing responden berjumlah 403 dan 309 mahasiswa. Sebelum membandingkan persepsi tersebut, Tabel 12 menyajikan informasi terkait profil tarif UKT untuk tahun akademik 2023/2024 berdasarkan wilayah perguruan tinggi. Berdasarkan data dari Tabel 12, rata-rata tarif UKT di perguruan tinggi wilayah Jawa-Sumatera lebih tinggi dibandingkan dengan perguruan tinggi di luar wilayah tersebut pada hampir semua kelompok UKT. Hanya pada Kelompok 1 dan Kelompok 8, tarif UKT rata-rata di wilayah Jawa-Sumatera lebih rendah dibandingkan di wilayah non Jawa-Sumatera. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan terhadap pendidikan berkualitas di kota-kota besar di Jawa dan Sumatera, serta keterbatasan tempat di perguruan tinggi negeri yang berkualitas di wilayah-wilayah tersebut.

a. Persepsi Mahasiswa atas Kesesuaian Penetapan Kelompok UKT

Dari Tabel 13 dapat diketahui bahwa mayoritas responden sudah memahami kriteria penetapan kelompok UKT dengan proporsi responden Jawa-Sumatera lebih tinggi, yaitu 67,74% untuk Jawa-Sumatera dan 64,72% untuk non Jawa-Sumatera. Selain itu, proporsi responden Jawa-Sumatera yang merasa penetapan besaran UKT sesuai dengan profil ekonomi keluarga mereka juga lebih tinggi dibandingkan mahasiswa non Jawa-Sumatera, yaitu 46,65% dan 42,39%. Artinya, pemahaman terkait indikator penetapan kelompok UKT dan kesesuaian penetapan kelompok UKT lebih tinggi pada mahasiswa pada kampus di wilayah Jawa-Sumatera. Hal ini menjadi catatan untuk perguruan tinggi wilayah non Jawa-Sumatera untuk melakukan sosialisasi lebih terkait kriteria penetapan UKT dan memastikan penetapan UKT dilakukan lebih adil dan sesuai dengan kondisi sosioekonomi keluarga mahasiswa masing-masing.

Kemudian, mahasiswa non Jawa-Sumatera mayoritas mengetahui terdapat mekanisme banding atas penetapan kelompok UKT, yaitu sebesar 74,43%. Proporsi tersebut lebih tinggi dibandingkan dari mahasiswa Jawa-Sumatera yang menyatakan mengetahui proses banding, yaitu sebesar 60,55%. Namun, mayoritas mahasiswa, baik mahasiswa Jawa-Sumatera maupun non Jawa-Sumatera yang mengetahui adanya proses banding, menyatakan tidak tahu apakah pemrosesan banding atas penetapan kelompok UKT sudah dilakukan secara adil.

b. Persepsi Mahasiswa atas Kepentingan dan Performa Layanan Perguruan Tinggi

Dari kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) yang tersaji pada Gambar 5 dan 6 dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat kepentingan atas indikator layanan dinilai lebih tinggi oleh mahasiswa non Jawa-Sumatera (5,37) dibandingkan dengan mahasiswa Jawa-Sumatera (5,23). Namun, rata-rata tingkat persepsi atas kenyataan kinerja layanan dari BLU dari mahasiswa non Jawa-Sumatera (4,63) sedikit lebih rendah dibandingkan persepsi mahasiswa Jawa-Sumatera (4,64). Artinya mahasiswa kampus non Jawa-Sumatera memiliki harapan sedikit lebih tinggi atas kualitas layanan perguruan tinggi.

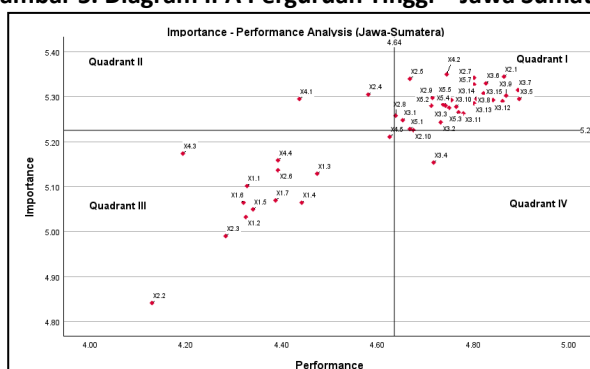
c. Persepsi Mahasiswa atas Kepuasan Layanan Perguruan Tinggi

Merangkum hasil kuesioner persepsi mahasiswa atas kepuasan layanan perguruan tinggi, diketahui bahwa mayoritas mahasiswa mempunyai kesan puas atas layanan perguruan tinggi baik wilayah Jawa-Sumatera maupun non Jawa-Sumatera. Mahasiswa Jawa-Sumatera yang merasakan sangat puas sebesar 11,91% dan puas sebesar 58,31% (total 70,22%). Sementara itu, mahasiswa non Jawa-Sumatera yang merasa sangat puas lebih sedikit dibanding mahasiswa Jawa-Sumatera, yaitu sebesar 8,41%; namun untuk yang merasakan puas lebih banyak yaitu sebesar 64,72 (total 73,13%). Ini artinya lebih besar proporsi mahasiswa non Jawa-Sumatera yang merasa sangat puas atau puas atas kualitas layanan kampusnya dibanding mahasiswa Jawa-Sumatera. Temuan ini cukup menarik karena selama ini permintaan atas layanan pendidikan tinggi di wilayah Jawa-Sumatera lebih tinggi dibandingkan area lain karena dianggap memiliki kualitas lebih baik. Namun dalam konteks ini, kemungkinan terjadi karena rata-rata tarif UKT di wilayah non Jawa-Sumatera lebih rendah sehingga mereka sudah cukup puas dengan kualitas yang diberikan oleh perguruan tingginya.

Namun, berdasarkan nilai CSI untuk wilayah Jawa-Sumatera (77,32%) tidak menunjukkan perbedaan yang berarti secara deskriptif dibandingkan dengan wilayah non-Jawa-Sumatera (77,22%). Meskipun demikian, kedua nilai tersebut berada dalam kategori yang sama, yaitu tingkat kepuasan "Puas" (Listifadah, 2021). Meskipun sudah mencapai tingkat ini, perguruan tinggi di kedua wilayah masih memiliki ruang untuk meningkatkan performa layanan mereka agar dapat memenuhi ekspektasi mahasiswa dengan lebih baik dan meningkatkan tingkat kepuasan secara

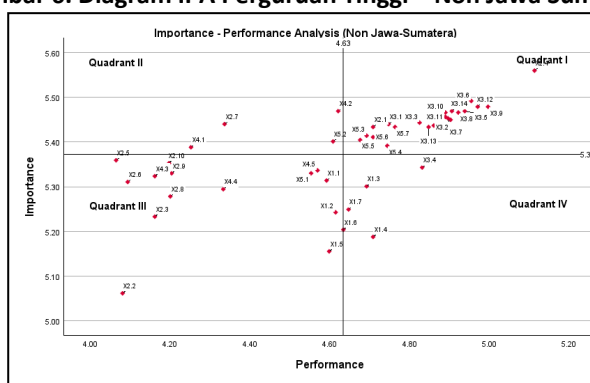
keseluruhan. Ini membuka peluang bagi pengelola perguruan tinggi untuk fokus pada peningkatan kualitas layanan, khususnya dalam area yang dinilai kurang optimal oleh mahasiswa.

Gambar 5. Diagram IPA Perguruan Tinggi – Jawa Sumatera



Sumber: Diolah Penulis

Gambar 6. Diagram IPA Perguruan Tinggi – Non Jawa Sumatera



Sumber: Diolah Penulis

d. Persepsi Mahasiswa atas Aksesibilitas Pembiayaan Pembayaran UKT Perguruan Tinggi

Hasil kuesioner terkait aksesibilitas pendanaan untuk membiayai UKT bagi responden Jawa-Sumatera dan non Jawa-Sumatera disajikan pada Tabel 14. Dari tabel tersebut diketahui bahwa mayoritas orang tua mahasiswa, baik dari wilayah Jawa-Sumatera maupun non-Jawa-Sumatera (72,70% dan 69,58%), mampu membiayai UKT setiap semesternya secara penuh. Selain itu, 14,55% mahasiswa dari Jawa-Sumatera dan 15,96% mahasiswa dari non-Jawa-Sumatera, yang orang tuanya tidak mampu membiayai UKT sepenuhnya, melaporkan pernah mendapatkan penurunan tarif UKT.

Hanya satu mahasiswa dari wilayah non-Jawa-Sumatera yang orang tuanya tidak mampu membiayai UKT sepenuhnya pernah mengambil cuti kuliah, namun hampir 44,68% dari mereka mengaku pernah berpikir untuk berhenti kuliah karena kesulitan membayar UKT. Di sisi lain, tidak ada mahasiswa dari wilayah Jawa-Sumatera yang orang tuanya tidak mampu membiayai UKT sepenuhnya yang pernah cuti kuliah, tetapi 49,90% dari mereka mengaku pernah berpikir untuk berhenti kuliah karena tidak mampu membayar UKT. Persentase mahasiswa dari Jawa-Sumatera yang pernah berpikir untuk berhenti kuliah jauh lebih tinggi dibandingkan mahasiswa dari non-Jawa-Sumatera. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh biaya hidup yang lebih tinggi di wilayah Jawa-Sumatera. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi kebijakan UKT di wilayah tersebut agar mahasiswa tetap dapat melanjutkan studinya.

Perbandingan persepsi berdasarkan karakteristik perguruan tinggi menunjukkan bahwa pernyataan mengenai ketidaksesuaian penentuan kelompok UKT lebih banyak berasal dari mahasiswa PTKIN dan wilayah Non Jawa-Sumatra. Temuan ini mengindikasikan adanya disparitas regional dan jenis institusi dalam implementasi kebijakan UKT dan pengelolaan PNB BLU. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi sosioekonomi regional, kapasitas pengelolaan keuangan di masing-masing institusi, serta tingkat pemahaman dan sosialisasi kebijakan UKT.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Dari analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, Berdasarkan analisis data survei, persepsi sebagian besar responden menyatakan bahwa penentuan kelompok UKT yang dibayarkan belum sesuai dengan profil sosioekonomi mereka (55,20%). Kemudian, dilihat berdasarkan karakteristik Perguruan Tinggi, mayoritas responden yang menyatakan bahwa penentuan kelompok UKT yang dibayarkan belum sesuai dengan kondisi sosioekonomi keluarga adalah mahasiswa dengan karakteristik PTKIN, wilayah Non Jawa Sumatera.

Kedua, berdasarkan uji *paired t-test* pada taraf kepercayaan 5%, terdapat gap signifikan antara tingkat kepentingan dan kinerja layanan perguruan tinggi berdasarkan. Gap ini paling nyata pada aspek fasilitas pendukung dan lingkungan fisik kampus, sehingga menjadi prioritas perbaikan layanan dalam pemanfaatan dana UKT sebagai bagian dari PNBP BLU. Dengan menggunakan *Importance Performance Analysis*, perguruan tinggi dapat memfokuskan perbaikan pada indikator yang berada pada Kuadran II (*Concentrate Here*), yang meliputi ketersediaan ruang kuliah yang memadai, ketersediaan alat dan perlengkapan mengajar yang memadai, keamanan dan keselamatan di area kampus, dan ketersediaan fasilitas teknologi informasi (TI) yang memadai.

Ketiga, berdasarkan persepsi mahasiswa atas kepuasan layanan perguruan tinggi dengan besaran UKT yang dibayarkan, sebagian besar menyatakan sangat puas dan puas (71,49%). Hal ini sejalan dengan nilai indeks yang didapatkan melalui pendekatan CSI, yaitu 77,27%, yang artinya mahasiswa Puas dengan layanan perguruan tinggi memuaskan. Kemudian, ketika dibandingkan antar jenis perguruan tinggi, indeks kepuasan yang diukur dengan CSI dari mahasiswa PTKIN lebih tinggi dibandingkan mahasiswa PTN. Sementara itu, pengamatan berdasarkan wilayah kampus tidak menunjukkan perbedaan berarti pada indeks kepuasan dari mahasiswa pada kampus wilayah Jawa-Sumatera (77,32%) dengan non Jawa-Sumatera (77,22%). Selain itu terdapat beberapa saran perbaikan yang layak untuk diperhatikan untuk makin meningkatkan kualitas layanan perguruan tinggi BLU.

Terakhir, dari sisi aksesibilitas pembiayaan, sumber dana pembayaran UKT mahasiswa sebagian besar adalah orang tua (71,35%). Namun perlu diperhatikan bahwa 28,65% lainnya mengandalkan sumber pendanaan lain yang sebagian besar berasal dari bantuan keluarga/kerabat selain orang tua, bantuan beasiswa, serta pinjaman dana. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk memastikan para mahasiswa tersebut mendapatkan akses dana untuk dapat terus melanjutkan pendidikan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menggarisbawahi bahwa ketidaksesuaian penetapan UKT dengan kondisi ekonomi mahasiswa serta kesenjangan kualitas layanan menunjukkan adanya tantangan dalam efektivitas pengelolaan UKT sebagai salah satu instrument kebijakan fiskal pendidikan. Pengelolaan UKT sebagai PNBP BLU adalah isu multidimensional yang tidak hanya melibatkan aspek pembiayaan pendidikan, tetapi juga aspek pengelolaan keuangan negara, pelayanan publik, dan keadilan sosial. Optimalisasi pengelolaan PNBP BLU dari UKT memerlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan fleksibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan mahasiswa.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran kebijakan yang dapat diusulkan untuk optimalisasi pengelolaan UKT sebagai PNBP BLU dalam kerangka pengelolaan keuangan negara:

a. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Penetapan UKT

Perguruan tinggi BLU perlu meningkatkan transparansi dalam proses penetapan kelompok UKT, termasuk kriteria dan mekanisme penentuan. Sosialisasi yang lebih masif dan jelas kepada calon mahasiswa dan orang tua perlu dilakukan. Mekanisme pengaduan dan peninjauan kembali penetapan UKT juga harus diperkuat untuk memastikan keadilan dan kesesuaian dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.

b. Optimalisasi Pemanfaatan PNBP BLU untuk Peningkatan Kualitas Layanan

Fleksibilitas pengelolaan dana UKT sebagai PNBP BLU harus dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan kualitas fasilitas pendukung dan infrastruktur kampus. Perguruan tinggi perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas penggunaan dana ini dan menyelaraskannya dengan kebutuhan prioritas mahasiswa, sebagaimana tercermin dari hasil survei kepuasan dan IPA.

c. Pengembangan Skema Pembiayaan Inklusif

Perguruan tinggi BLU, dengan otonomi keuangannya, didorong untuk mengembangkan skema bantuan finansial yang lebih adaptif dan inklusif, misalnya beasiswa berbasis kebutuhan, cicilan pembayaran UKT, atau kemitraan dengan lembaga penyalur dana pendidikan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban finansial mahasiswa dan memastikan akses pendidikan tinggi tidak terhambat oleh keterbatasan ekonomi.

d. Penguatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan BLU

Diperlukan program peningkatan kapasitas bagi pengelola keuangan di perguruan tinggi BLU, terutama di PTKIN dan institusi di wilayah Non Jawa-Sumatra, untuk memastikan pengelolaan PNBP BLU yang efisien, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini mencakup pelatihan dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan keuangan, dan manajemen risiko.

e. Harmonisasi Kebijakan UKT dan PNBP BLU

Pemerintah perlu terus melakukan harmonisasi antara kebijakan UKT dengan regulasi PNBP BLU untuk memastikan konsistensi dan sinergi dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berkualitas dan merata. Evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan UKT dan PNBP BLU terhadap aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan tinggi perlu dilakukan untuk penyesuaian kebijakan yang berkelanjutan.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan pengelolaan UKT sebagai PNBP BLU dapat lebih efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, sekaligus memastikan prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

6. KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada mahasiswa program studi diploma atau sarjana di bawah Jurusan Akuntansi/ Fakultas Ekonomi/ Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada sepuluh perguruan tinggi BLU. Hal ini menyebabkan generalisasi hasil penelitian ini terbatas pada sampel tersebut. Kemudian, data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif dan hanya mengandalkan kuesioner sebagai metode pengumpulan data, sehingga beberapa temuan bersifat indikasi awal yang perlu digali lebih dalam melalui wawancara mendalam dan data aktual keuangan terkait pengelolaan PNBP pada BLU perguruan tinggi. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya menyebabkan penelitian ini belum mengeksplorasi faktor-faktor lain di luar UKT yang mungkin mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap layanan perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amany, T. S., Putri Maharani, D., & Firmansyah, A. (2020). Peran Pendapatan dan Ukuran Badan Layanan Umum Terhadap Akreditasi Badan Layanan Umum Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2(1). <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1004/516>
- Anggraini, N. Z., & Yuliana, N. (2024). Diskusi Mengenai Kebijakan yang Diterapkan di Lingkungan Kampus. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 5(1). <https://doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317>
- Azzopardi, E., & Nash, R. (2013). A critical evaluation of importance-performance analysis. *Tourism Management*, 35, 222–233. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.07.007>
- Babbie, E. R. (2021). *The Practice of Social Research* (15th edition). Cengage Learning.
- Bemowski, K. (1991). Restoring the Pillars of higher education. *Quality Progress*, 24(10).
- BPS. (2023a). *Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Jenis Kelamin*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ0NiMy/angka-partisipasi-kasar--apk--perguruan-tinggi--pt--menurut-jenis-kelamin.html>
- BPS. (2023b). *Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Kuintil Pengeluaran, 2021-2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ0NCMy/angka-partisipasi-kasar--apk--perguruan-tinggi--pt--menurut-kuintil-pengeluaran.html>
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods* (4th edition). Oxford University Press.
- Carolina, M. (2021). *Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) dan Tantangan BLU Tahun 2021*.
- Chomeya, R. (2010). Quality of Psychology Test Between Likert Scale 5 and 6 Points. *Journal of Social Sciences*, 6(3), 399–403.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (4th edition). Pearson.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (5th edition). SAGE Publications.
- Fauziah, E., & Purnamasari, H. (2025). Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Keadilan Sosial: Analisis Berdasarkan Pendekatan Capability Approach. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(9).
- Field, A. (2018). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics*. SAGE Publications.
- Fornell, C., Johnson, M. D., Anderson, E. W., Cha, J., & Bryant, B. E. (1996). The American Customer Satisfaction Index: Nature, Purpose, and Findings. In *Source: Journal of Marketing* (Vol. 60, Issue 4).
- Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2012). *How to Design and Evaluate Research in Education* (8th edition). McGraw Hill.
- Gamage, D. T., Suwanabroma, J., Ueyama, T., Hada, S., & Sekikawa, E. (2008). The impact of quality assurance measures on student services at the Japanese and Thai private universities. *Quality Assurance in Education*, 16(2), 181–198. <https://doi.org/10.1108/09684880810868457>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozi, S., & Rakim, A. R. (2019). Analisis Kinerja Layanan Perguruan Tinggi Menggunakan Customer Satisfaction Index (CSI) dan Importance Performance Analysis (IPA). In *Journal of Data Analysis* (Vol. 2, Issue 1).
- Given, L. (2012). The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods. In *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. <https://doi.org/10.4135/9781412963909>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (2nd edition). SAGE Publications.
- Harrold, R. I. (1976). Tuition fee discrimination at non-government schools. In *Journal of Educational Administration* (Vol. 14, Issue 2, pp. 252–260). <https://doi.org/10.1108/eb009758>
- Iskandar, Jannah, S., Ujiana Putri, S., Musriwan, & Sulkifli Herman. (2024). Analisis kebijakan biaya pendidikan dalam upaya peningkatan pendapatan STIBA Makassar. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*.

- Issa Nauffal, D. (2009). Do educational outcomes in Lebanese universities differ based on the academic model? *Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues*, 2(1), 6–19. <https://doi.org/10.1108/17537980910938442>
- Johnson, M. D., Gustafsson, A., Andreassen, W., Lervik, L., & Cha, J. (2001). The evolution and future of national customer satisfaction index models. In *Journal of Economic Psychology* (Vol. 22). www.elsevier.com/locate/joep
- Johnstone, D. B. (2004). The economics and politics of cost sharing in higher education: Comparative perspectives. *Economics of Education Review*, 23(4), 403–410. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2003.09.004>
- Kimani, S. W., Kagira, E. K., & Kendi, L. (2011). Comparative Analysis of Business Students' Perceptions of Service Quality Offered in Kenyan Universities. *International Journal of Business Administration*, 2(1). <https://doi.org/10.5430/ijba.v2n1p98>
- Kurniawan, A., & Sugiri, D. (2021). Kepuasan Pengguna Layanan Publik Pada Unit Kerja Badan Layanan Umum (BLU) Bidang Pendidikan. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, VIII(1), 11–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.144>
- Likert, R. (1932). *A Technique for the Measurement of Attitudes*. New York University. https://legacy.voteview.com/pdf/Likert_1932.pdf
- Listifadah, L. (2021). Evaluasi Kinerja Pelayanan Kereta Api Bandara Manggarai-Soekarno Hatta Berdasarkan Persepsi Pengguna Jasa. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 22(2), 180–193. <https://doi.org/10.25104/jptd.v22i2.1668>
- Martilla, J. A., & James, J. C. (1977). Importance-Performance Analysis. In *Source: The Journal of Marketing* (Vol. 41, Issue 1).
- Nuckols, W., Bullington, K. E., & Gregory, D. E. (2020). Was it Worth it? Using Student Loans to Finance a College Degree. *Higher Education Politics & Economics*, 6(1), 1–19. <https://doi.org/10.32674/hepe.v6i1.1358>
- Owlia, M. S., & Aspinwall, E. M. (1997). TQM in higher education - a review. *International Journal of Quality and Reliability Management*, 14(5). <https://doi.org/10.1108/02656719710170747>
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A Multiple-item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. *Journal of Retailing*, 64(1). <https://www.researchgate.net/publication/200827786>
- Phillips, R. L. (2021). Pricing and Revenue Optimization. In *Pricing and Revenue Optimization*. <https://doi.org/10.1515/9781503614260>
- Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Agama Nomor 7 tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 155/PMK/02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP.
- Republik Indonesia. (2023). Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2023 tentang UKT pada PTKIN Tahun Akademik 2023-2024.
- Retnoningsih, Y. D., & Marom, A. (2017). Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Uang Kuliah Tunggal Bagi. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i2.16064>
- Salmi, J., & Bassett, R. M. (2014). The equity imperative in tertiary education: Promoting fairness and efficiency. *International Review of Education*, 60(3), 361–377. <https://doi.org/10.1007/s11159-013-9391-z>
- Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., Lewis, S. •, & Thornhill, •. (2009). *Research methods for business students* (5th edition). Pearson. www.pearsoned.co.uk

- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (7th edition). Wiley. www.wileypluslearningspace.com
- Slack, N. (1994). The Importance-Performance Matrix as a Determinant of Improvement Priority. In *International Journal of Operations & Production Management* (Vol. 14, Issue 5). © MCB University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/01443579410056803>
- Stiglitz, J. E. (1975). American Economic Association The Theory of "Screening," Education, and the Distribution of Income. In *Source: The American Economic Review* (Vol. 65, Issue 3). <http://www.jstor.orgURL:http://www.jstor.org/stable/1804834>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarno, Gimin, & Nas, S. (2017). Dampak Biaya Kuliah Tunggal Terhadap Kualitas Layanan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2, 184–194. <https://ejournal.uksw.edu/kelola/article/view/1232/712>
- Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach's alpha. In *International journal of medical education* (Vol. 2, pp. 53–55). <https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd>
- Teeroovengadum, V., Kamalanabhan, T. J., & Seebaluck, A. K. (2016). Measuring service quality in higher education: Development of a hierarchical model (HESQUAL). *Quality Assurance in Education*, 24(2), 244–258. <https://doi.org/10.1108/QAE-06-2014-0028>
- Tilak, J. B. G. (2018). *Higher Education, Public Good and Markets*. Routledge.
- Waluyo, B. (2018). Balancing financial autonomy and control in agencification: Issues emerging from the Indonesian higher education. *International Journal of Public Sector Management*, 31(7), 794–810. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-10-2017-0272>
- Wright, K. B. (2005). Researching Internet-Based Populations: Advantages and Disadvantages of Online Survey Research, Online Questionnaire Authoring Software Packages, and Web Survey Services. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 10(3), JCMC1034. <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2005.tb00259.x>
- Yanni, R. P., Aina, & Suryanef. (2018). Persepsi Mahasiswa PPKn Tentang Pelaksanaan dan Kebijakan Tunggal di Universitas Negeri Padang. *Journal of Civic Education*, 1(1), 27–34. <https://scholar.archive.org/work/cnsjg5mwmjbthnmbfkhnx2bym/access/wayback/http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/download/6/5>
- Yanti, I. (2023). *Persepsi Mahasiswa terhadap Penetapan UKT di IAIN Parepare* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare]. <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4998/>

LAMPIRAN

Tabel 1. Sampel Perguruan Tinggi BLU

No.	Kementerian Induk (Jenis PT)	Jumlah mahasiswa ^a	Ukuran	Wilayah	Kode	Jumlah responden
1	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (PTN)	35.100	Besar	Sumatera	PA	43
2		34.500	Besar	Sulawesi	PB	158
3		25.000	Sedang	Jawa	PC	40
4		20.700	Sedang	Kalimantan	PD	41
5		2.500	Kecil	Bali Nusra	PE	74
6		8.100	Kecil	Jawa	PF	69
7	Kementerian Agama (PTKIN)	33.500	Besar	Jawa	AA	96
8		27.400	Sedang	Sulawesi	AB	36
9		21.400	Sedang	Sumatera	AC	135
10		11.900	Kecil	Jawa	AD	20
TOTAL						712

^a Dibulatkan angka ratusan, data Semester Ganjil 2023

Sumber: Diolah dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Kemendikbudristek

Tabel 2. Profil Responden

		n	%
Jumlah sampel		712	100,00%
Jenis kelamin	Laki-laki	186	26,12%
	Perempuan	526	73,88%
Penghasilan orang tua	di atas Rp30.000.000	8	1,12%
	Rp20.000.001 s.d. Rp30.000.000	3	0,42%
	Rp10.000.001 s.d. Rp20.000.000	20	2,81%
	Rp5.000.000 s.d. Rp 10.000.000	101	14,19%
	di bawah Rp5.000.000	580	81,46%
Angkatan Masuk	2022/2023	334	46,91%
	2023/2024	378	53,09%
Jalur Seleksi Masuk	Seleksi Berdasarkan Prestasi	195	27,39%
	Seleksi Berdasarkan Tes	296	41,57%
	Seleksi Jalur Mandiri	214	30,06%
	Seleksi Jalur Kerja Sama	4	0,56%
	Seleksi Jalur PBUD	3	0,42%
Jenis Perguruan Tinggi	PTN	425	59,69%
	PTKIN	287	40,31%
Wilayah kampus	Jawa	225	31,60%
	Sumatera	178	25,00%
	Bali Nusra	74	10,39%
	Kalimantan	41	5,76%
	Sulawesi	194	27,25%
Kelompok UKT	Beasiswa/KIP-K	34	4,78%
	Kelompok 1	32	4,49%
	Kelompok 2	123	17,28%
	Kelompok 3	180	25,28%
	Kelompok 4	77	10,81%
	Kelompok 5	83	11,66%
	Kelompok 6	59	8,29%
	Kelompok 7	79	11,10%
	Kelompok 8	45	6,32%

Sumber: Diolah penulis

Tabel 3. Rata-rata Tarif UKT per Kelompok (dalam rupiah)

Kelompok UKT	TA 2022/2023			TA 2023/2024		
	Min	Max	Average	Min	Max	Average
Kelompok 1	400.000	500.000	466.667	400.000	500.000	466.667
Kelompok 2	850.000	3.416.000	1.386.677	850.000	3.416.000	1.396.617
Kelompok 3	1.250.000	4.000.000	2.536.708	1.250.000	4.000.000	2.556.563
Kelompok 4	1.750.000	5.200.000	3.147.896	1.750.000	5.200.000	3.177.667
Kelompok 5	2.250.000	6.400.000	3.842.604	2.250.000	6.400.000	3.882.250
Kelompok 6	3.000.000	7.474.500	4.803.872	3.000.000	7.474.500	4.854.532
Kelompok 7	4.000.000	8.305.000	5.592.167	4.000.000	8.305.000	5.640.440
Kelompok 8	5.400.000	6.100.000	5.800.000	5.400.000	6.100.000	5.800.000

Sumber: Diolah penulis

Tabel 4. Hasil Survei Kesesuaian Penetapan Kelompok UKT

Pertanyaan	Jumlah Responden	Jawaban	n	%
Apakah Anda memahami indikator/ kriteria yang digunakan dalam penetapan kelompok UKT mahasiswa?	712	Ya	473	66,43%
		Tidak	239	33,57%
Apakah menurut Anda kelompok/besaran UKT yang ditetapkan untuk Anda sesuai dengan profil sosioekonomi keluarga Anda?	712	Ya	319	44,80%
		Tidak	393	55,20%
Apakah Perguruan Tinggi Anda memberikan kesempatan untuk melakukan peninjauan kembali/banding atas penetapan kelompok UKT mahasiswa?	712	Ya	474	66,57%
		Tidak	47	6,60%
		Tidak tahu	191	26,83%
Apakah Perguruan Tinggi Anda memproses pengajuan peninjauan kembali/banding atas penetapan kelompok UKT mahasiswa dengan adil?	474	Ya	231	48,73%
		Tidak	48	10,13%
		Tidak Tahu	195	41,14%

Sumber: Diolah penulis

Tabel 5. Kategori Penghasilan Orang Tua dan Kelompok UKT

Penghasilan/ Kelompok UKT	1	2	3	4	5	6	7	8	Lainnya	Total
di bawah Rp5.000.000	48	121	147	68	59	43	37	20	37	580
Rp5.000.000 s.d. Rp10.000.000	2	3	20	13	14	12	23	10	3	100
Rp10.000.001 s.d. Rp20.000.000			2		4	4	10		0	20
Rp20.000.001 s.d. Rp30.000.000					1		2		0	3
di atas Rp30.000.000	1		2			1	2	2	0	8
Total	51	124	171	81	78	60	74	32	40	711

Sumber: Diolah penulis

Tabel 6. Hasil Uji Kesenjangan Nilai Kepentingan dan Performa

Indikator	Perf	Imp	Diff. (Gap)	t	Sig.
1. Aspek Kualitas Administratif	4,49	5,14	-0,6541		
X1.1 Kesiapan staf administrasi untuk membantu mahasiswa	4,44	5,19	-0,7514	-19,180	0,000
X1.2 Kemampuan staf administrasi dalam menyelesaikan masalah mahasiswa	4,45	5,12	-0,6728	-16,129	0,000
X1.3 Keramahan dan kesopanan staf administrasi	4,57	5,20	-0,6348	-15,575	0,000
X1.4 Perilaku staf administrasi yang memberikan kepercayaan kepada mahasiswa	4,56	5,12	-0,5604	-14,928	0,000
X1.5 Proses administratif terstandarisasi dengan baik sehingga tidak banyak birokrasi dan kesulitan yang tidak diperlukan	4,45	5,10	-0,6433	-15,094	0,000
X1.6 Prosedur administratif jelas dan terstruktur dengan baik sehingga layanan dapat diselesaikan secara tepat waktu	4,46	5,13	-0,6685	-15,212	0,000
X1.7 Transparansi atas peraturan dan prosedur yang resmi berlaku	4,50	5,15	-0,6475	-15,472	0,000
2. Aspek Kualitas Fisik Lingkungan Kampus	4,46	5,26	-0,8013		
X2.1 Ketersediaan infrastruktur perpustakaan yang memadai	4,80	5,38	-0,5871	-15,370	0,000
X2.2 Ketersediaan infrastruktur rekreasi dan olahraga yang memadai	4,11	4,94	-0,8287	-17,438	0,000
X2.3 Ketersediaan infrastruktur kantin yang memadai	4,23	5,10	-0,8652	-17,718	0,000
X2.4 Ketersediaan infrastruktur tempat ibadah yang memadai	4,81	5,42	-0,6039	-14,242	0,000
X2.5 Memiliki ruang kuliah yang memadai	4,41	5,35	-0,9424	-18,218	0,000
X2.6 Memiliki tempat yang tenang untuk belajar (<i>quiet space</i>) di area kampus	4,26	5,21	-0,9494	-19,403	0,000
X2.7 Ketersediaan alat dan perlengkapan mengajar yang memadai (misalnya proyektor, papan tulis)	4,60	5,38	-0,7851	-18,009	0,000
X2.8 Kondisi lingkungan yang mendukung (misalnya ventilasi cukup, tidak bising, tidak bau) di area kampus	4,45	5,27	-0,8188	-18,633	0,000
X2.9 Keamanan dan keselamatan di area kampus	4,49	5,31	-0,8188	-18,209	0,000
X2.10 Kebersihan dan kerapian penampilan bangunan serta halaman area kampus	4,47	5,28	-0,8132	-17,303	0,000
3. Aspek Kualitas Pendidikan Inti	4,84	5,35	-0,5133		
X3.1 Sikap dosen menunjukkan minat dalam memahami dan memecahkan masalah mahasiswa	4,69	5,33	-0,6376	-17,815	0,000
X3.2 Ketersediaan dosen untuk membimbing dan memberi konsultasi/nasihat kepada mahasiswa terkait akademik	4,79	5,33	-0,5393	-14,599	0,000
X3.3 Kemampuan dosen menanamkan kepercayaan diri kepada mahasiswa	4,78	5,35	-0,5660	-16,008	0,000
X3.4 Sikap dosen menunjukkan perilaku yang tidak bias dan tidak diskriminatif pada mahasiswa	4,77	5,24	-0,4691	-13,915	0,000
X3.5 Kualifikasi, pengetahuan teoretis, dan pengetahuan praktis dosen yang komprehensif di bidangnya	4,91	5,37	-0,4565	-14,179	0,000
X3.6 Keterampilan dosen dalam komunikasi yang baik dan efektif	4,88	5,40	-0,5183	-16,021	0,000
X3.7 Kemampuan dosen untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru (<i>up-to-date</i>) di bidang keahliannya	4,89	5,38	-0,4803	-15,167	0,000
X3.8 Penggunaan alat dan teknik yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa (permainan pembelajaran, studi kasus, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, dll.)	4,88	5,37	-0,4916	-14,574	0,000
X3.9 Partisipasi aktif mahasiswa pada proses pembelajaran	4,92	5,38	-0,4551	-14,648	0,000
X3.10 Tersedianya umpan balik secara teratur kepada mahasiswa tentang kinerja akademik mereka	4,82	5,36	-0,5407	-15,775	0,000
X3.11 Rancangan ujian dan tugas yang baik untuk memastikan peningkatan keterampilan pengetahuan mahasiswa	4,83	5,35	-0,5197	-15,600	0,000
X3.12 Tujuan dan kerangka mata kuliah terdefinisi dengan jelas	4,91	5,37	-0,4635	-15,325	0,000
X3.13 Konten dan desain modul mata kuliah yang disediakan membantu memenuhi kebutuhan akademik mahasiswa	4,82	5,35	-0,5281	-16,030	0,000
X3.14 Kurikulum yang dirancang dapat meningkatkan kemampuan intelektual mahasiswa (pengambilan keputusan, pemecahan masalah)	4,85	5,37	-0,5211	-16,454	0,000
X3.15 Kurikulum yang dirancang relevan dengan perspektif pekerjaan masa depan mahasiswa	4,86	5,37	-0,5126	-16,121	0,000

4. Aspek Kualitas Fasilitas Pendukung	4,44	5,29	-0,8528		
X4.1 Ketersediaan fasilitas teknologi informasi (TI) yang memadai (komputer, internet/Wi-Fi, software terkait pembelajaran)	4,36	5,34	-0,9789	-20,374	0,000
X4.2 Ketersediaan fasilitas perpustakaan yang memadai (buku, majalah, surat kabar, akses ke database/referensi online)	4,69	5,40	-0,7107	-17,963	0,000
X4.3 Ketersediaan dan kecukupan fasilitas fotokopi dan pencetakan yang memadai bagi mahasiswa	4,18	5,24	-1,0590	-20,184	0,000
X4.4 Ketersediaan dan kecukupan fasilitas layanan konseling untuk masalah non akademis yang memadai	4,37	5,22	-0,8511	-18,191	0,000
X4.5 Ketersediaan dan kecukupan dukungan kampus untuk kegiatan ekstrakurikuler	4,60	5,27	-0,6643	-16,129	0,000
5. Aspek Kualitas Transformasi	4,71	5,33	-0,6176		
X5.1 Suasana Perguruan Tinggi yang mampu memberdayakan mahasiswa untuk menjadi stabil secara emosional	4,62	5,27	-0,6545	-17,130	0,000
X5.2 Suasana Perguruan Tinggi yang mampu meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa	4,67	5,33	-0,6657	-18,403	0,000
X5.3 Suasana Perguruan Tinggi yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa	4,74	5,33	-0,5941	-16,635	0,000
X5.4 Suasana Perguruan Tinggi yang mampu meningkatkan kesadaran diri (self-awareness) mahasiswa	4,74	5,33	-0,5899	-16,852	0,000
X5.5 Suasana Perguruan Tinggi yang mampu mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam pemecahan masalah terkait dengan bidang studi mereka	4,71	5,33	-0,6208	-17,146	0,000
X5.6 Suasana Perguruan Tinggi yang mampu memberdayakan mahasiswa untuk melampaui prasangka mereka dengan berpikir terbuka (<i>open-minded</i>) atas ide-ide baru	4,73	5,34	-0,6096	-16,493	0,000
X5.7 Suasana Perguruan Tinggi yang mampu meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan mahasiswa untuk melaksanakan pekerjaan di masa depan	4,79	5,37	-0,5885	-16,919	0,000

Sumber: Diolah penulis

Tabel 7. Hasil Survei Tingkat Kepuasan atas Layanan

	n	%
Sangat Puas	74	10,39%
Puas	435	61,10%
Tidak Puas	181	25,42%
Sangat Tidak Puas	22	3,09%
Total	712	100,00%

Sumber: Diolah penulis

Tabel 8. Hasil Survei Aksesibilitas Pembiayaan Pembayaran UKT

Pertanyaan	N	Jawaban	n	%
Apakah orang tua Anda dapat membiayai UKT Anda tiap semester secara penuh?	712	Ya	508	71,35%
		Tidak	204	28,65%
Apakah Anda pernah mendapatkan penurunan tarif atau pemberian keringanan UKT dari Perguruan Tinggi Anda?	204	Ya	31	15,20%
		Tidak	173	84,80%
Apakah Anda pernah melakukan cuti kuliah karena tidak dapat membayar UKT?	204	Ya	1	0,49%
		Tidak	203	99,51%
Apakah Anda pernah berpikir untuk berhenti kuliah karena tidak dapat membayar UKT?	204	Ya	96	47,06%
		Tidak	108	52,94%

Sumber: Diolah penulis

Tabel 9. Rata-rata Tarif UKT TA 2023/2024 PTN dan PTKIN (dalam Rp)

Kelompok UKT	PTN			PTKIN		
	Min	Max	Average	Min	Max	Average
Kelompok 1	500.000	500.000	500.000	400.000	400.000	400.000
Kelompok 2	850.000	1.000.000	962.500	1.187.600	3.416.000	2.264.850
Kelompok 3	1.250.000	4.000.000	2.370.313	2.301.750	3.916.000	2.929.063
Kelompok 4	1.750.000	5.200.000	2.905.281	3.150.000	4.152.500	3.722.438
Kelompok 5	2.250.000	6.400.000	3.500.563	3.780.000	5.813.500	4.645.625
Kelompok 6	3.000.000	7.400.000	4.470.968	4.410.000	7.474.500	5.597.688
Kelompok 7	4.000.000	7.500.000	5.157.654	6.032.000	8.305.000	6.424.969
Kelompok 8	5.400.000	6.100.000	5.800.000	-	-	-

Sumber: Diolah penulis

Tabel 10. Perbandingan Persepsi Mahasiswa atas Kesesuaian Penentuan Kelompok UKT Berdasarkan Jenis Perguruan Tinggi

Pertanyaan	Jawaban	PTN		PTKIN	
		n	%	n	%
Apakah Anda memahami indikator/ kriteria yang digunakan dalam penetapan kelompok UKT mahasiswa?	Ya	278	65,41%	195	67,94%
	Tidak	147	34,59%	92	32,06%
Apakah menurut Anda kelompok/besaran UKT yang ditetapkan untuk Anda sesuai dengan profil sosioekonomi keluarga Anda?	Ya	200	47,06%	119	41,46%
	Tidak	225	52,94%	168	58,54%
Apakah Perguruan Tinggi Anda memberikan kesempatan untuk melakukan peninjauan kembali/banding atas penetapan kelompok UKT mahasiswa?	Ya	323	76,00%	151	52,61%
	Tidak	16	3,76%	31	10,80%
	Tidak tahu	86	20,24%	105	36,59%
Apakah Perguruan Tinggi Anda memproses pengajuan peninjauan kembali/banding atas penetapan kelompok UKT mahasiswa dengan adil?	Ya	172	53,25%	59	39,07%
	Tidak	20	6,19%	28	18,54%
	Tidak Tahu	131	40,56%	64	42,38%

Sumber: Diolah Penulis

Tabel 11. Perbandingan Persepsi Mahasiswa atas Aksesibilitas Pembiayaan Pembayaran UKT Berdasarkan Jenis Perguruan Tinggi

Pertanyaan	Jawaban	PTN		PTKIN	
		n	%	n	%
Apakah orang tua Anda dapat membiayai UKT Anda tiap semester secara penuh?	Ya	299	70,35%	209	72,82%
	Tidak	126	29,65%	78	27,18%
Apakah Anda pernah mendapatkan penurunan tarif atau pemberian keringanan UKT dari Perguruan Tinggi Anda?	Ya	22	17,46%	9	11,54%
	Tidak	104	82,54%	69	88,46%
Apakah Anda pernah melakukan cuti kuliah karena tidak dapat membayar UKT?	Ya	1	0,79%	0	0,00%
	Tidak	125	99,21%	78	100,00%
Apakah Anda pernah berpikir untuk berhenti kuliah karena tidak dapat membayar UKT?	Ya	46	36,51%	50	64,10%
	Tidak	80	63,49%	28	35,90%

Sumber: Diolah Penulis

Tabel 12. Rata-rata Tarif UKT TA 2023/2024 per Wilayah (dalam rupiah)

Kelompok UKT	Jawa-Sumatera			Non Jawa-Sumatera		
	Min	Max	Average	Min	Max	Average
Kelompok 1	400.000	500.000	463.333	400.000	500.000	472.222
Kelompok 2	1.000.000	3.416.000	1.526.253	850.000	1.890.000	1.180.556
Kelompok 3	2.050.000	3.916.000	2.878.833	1.250.000	4.000.000	2.019.444
Kelompok 4	2.200.000	4.250.000	3.494.467	1.750.000	5.200.000	2.649.667
Kelompok 5	2.742.000	5.813.500	4.240.000	2.250.000	6.400.000	3.286.000
Kelompok 6	3.150.000	7.474.500	5.390.862	3.000.000	7.000.000	3.990.444
Kelompok 7	4.000.000	8.305.000	6.252.479	4.000.000	7.500.000	4.824.389
Kelompok 8	5.400.000	6.100.000	5.700.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000

Sumber: Diolah Penulis

Tabel 13. Perbandingan Persepsi Mahasiswa atas Kesesuaian Penentuan Kelompok UKT Berdasarkan Wilayah Perguruan Tinggi

Pertanyaan	Jawaban	Jawa-Sumatera		Non Jawa-Sumatera	
		n	%	n	%
Apakah Anda memahami indikator/ kriteria yang digunakan dalam penetapan kelompok UKT mahasiswa?	Ya	273	67,74%	200	64,72%
	Tidak	130	32,26%	109	35,28%
Apakah menurut Anda kelompok/besaran UKT yang ditetapkan untuk Anda sesuai dengan profil sosioekonomi keluarga Anda?	Ya	188	46,65%	131	42,39%
	Tidak	215	53,35%	178	57,61%
Apakah Perguruan Tinggi Anda memberikan kesempatan untuk melakukan peninjauan kembali/banding atas penetapan kelompok UKT mahasiswa?	Ya	244	60,55%	230	74,43%
	Tidak	126	31,27%	65	21,04%
	Tidak tahu	33	8,19%	14	4,53%
Apakah Perguruan Tinggi Anda memproses pengajuan peninjauan kembali/banding atas penetapan kelompok UKT mahasiswa dengan adil?	Ya	100	40,98%	95	41,30%
	Tidak	29	11,89%	19	8,26%
	Tidak Tahu	115	47,13%	116	50,43%

Sumber: Diolah Penulis

Tabel 14. Perbandingan Persepsi Mahasiswa atas Aksesibilitas Pembiayaan Pembayaran UKT Berdasarkan Wilayah Perguruan Tinggi

Pertanyaan	Jawaban	Jawa-Sumatera		Non Jawa-Sumatera	
		n	%	n	%
Apakah orang tua Anda dapat membiayai UKT Anda tiap semester secara penuh?	Ya	293	72,70%	215	69,58%
	Tidak	110	27,30%	94	30,42%
Apakah Anda pernah mendapatkan penurunan tarif atau pemberian keringanan UKT dari Perguruan Tinggi Anda?	Ya	16	14,55%	15	15,96%
	Tidak	94	85,45%	79	84,04%
Apakah Anda pernah melakukan cuti kuliah karena tidak dapat membayar UKT?	Ya	0	0,00%	1	1,06%
	Tidak	110	100,00%	93	98,94%
Apakah Anda pernah berpikir untuk berhenti kuliah karena tidak dapat membayar UKT?	Ya	54	49,09%	42	44,68%
	Tidak	56	50,91%	52	55,32%

Sumber: Diolah Penulis